

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2025 – 2029





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Pamekasan. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dengan Bapperida dan pemangku kepentingan terkait.

Pamekasan, 20 November 2025

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN



AKHMAD BASRI YULIANTO, S.H., M.Si

NIP. 19680731 199803 1 002

Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	IV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	38
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	38
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	38
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	64
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	65
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	143
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	144
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	144
2.2.1.1 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga Terkait dan Provinsi	148
2.2.1.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	152
2.2.1.3 Telaah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	153
2.2.1.4 Telaah Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPIPD).....	154
2.2.2 Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan....	156
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	164
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2025-2029.....	164
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2025-2029	169
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	185
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	185
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	258



4.2.1	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	258
4.2.2	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	260
BAB 5	PENUTUP.....	263
LAMPIRAN		266



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rincian Sistematika Penulisan	9
Tabel 2. 1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai.....	65
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan	67
Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	89
Tabel 2. 4 Identifikasi Permasalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan	145
Tabel 2. 5 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD	146
Tabel 2. 6 Tabel Bantuan Pemetaan Telaah Renstra K/L Renstra Provinsi	148
Tabel 2. 7 Tabel 2.7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	152
Tabel 2. 8 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	153
Tabel 2. 9 Telaah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJIPD).....	155
Tabel 2. 10 Isu Strategis	159
Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	167
Tabel 3. 2 Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan	169
Tabel 3. 3 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	173
Tabel 3. 4 Penahapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	176
Tabel 3. 5 Tabel 3.5 Linearitas Operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	177
Tabel 3. 6 Matriks Arah Kebijakan.....	182
Tabel 3. 7 Integrasi Janji Politik dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	183
Tabel 4. 1 Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	186



Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	211
Tabel 4. 3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	257
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	259
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	260



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Gambar Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya	2
Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39
Gambar 2. 2 Pohon Permasalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157
Gambar 3. 1 Cascading Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan	166



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan selain berpedoman pada Permendagri No 86 Tahun 2017 juga berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pamekasan pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Pamekasan, dan penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Renstra Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait. Selain itu RPJMD juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, koordinasi dan sinkronisasi lintas

The diagram illustrates the Provincial and District/City Planning Process, showing the flow of planning documents and the roles of various entities.

Central Column (Provincial and District/City Level Plans):

- Top Level:** RTRW PROVINSI, RPJN, RTRW KAB/KOTA
- Second Level:** RPJM, RPJMN
- Third Level:** RPIP PROVINSI, RPIP KAB/KOTA
- Fourth Level:** RPMD PROVINSI, RPMD KAB/KOTA
- Fifth Level:** RENSTRA PD PROVINSI, REASTRA PD KAB/KOTA
- Sixth Level:** DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN

Side Columns (Provincial and District/City Level Plans):

- Left Side (Provincial Level):** KLHS RPJMD, RANTEK RPJMD, RIPIPID, EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN TERAKHIR, DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SEKTORAL LAINNYA
- Right Side (District/City Level):** KLHS RPJMD, RANTEK RPJMD, RIPIPID, EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN TERAKHIR, DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SEKTORAL LAINNYA

Flow and Relationships:

- Vertical Flow:** Documents flow from top to bottom, with arrows indicating the direction of the process.
- Horizontal Flow:** Documents flow from left to right, with arrows indicating the direction of the process.
- Diagonal Flow:** Documents flow from top-left to bottom-right, with arrows indicating the direction of the process.
- Feedback Loops:** Arrows indicate feedback loops from evaluation and risk management back to planning and implementation.

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004

2



Kabupaten Pamekasan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan



Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana



Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;



26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.
31. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;



2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada dokumen RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;



2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 1 Rincian Sistematika Penulisan

NO	BAGIAN		ISI	KETERANGA N
1	PENDAHULUAN			
1.1	Latar Belakang	a	Uraian Latar Belakang (hubungan antara RENSTRA SKPD dengan RPJMD)	Narasi pada Latar Belakang berisi: 1. Penjelasan tuntutan pembangunan terkait urusan yang diampu 2. Uraian pengertian dan fungsi Renstra



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			perangkat daerah 3. Uraian keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	b. Landasan Hukum yang berisi Poin-poin yang menjadi dasar hukum penyusunan karena di dalamnya terdapat aturan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan	A. Dituliskan mulai dari landasan hukum tertinggi sesuai urusan nomor dan tahun, dimulai dari: 1. Undang-Undang 2. Peraturan pemerintah 3. Peraturan presiden 4. Peraturan menteri 5. Peraturan daerah 6. Peraturan kepala daerah B. Mencantumkan lembaran



NO	BAGIAN		ISI	KETERANGA N
				negara untuk UU, PP Pengganti Undang- Undang, PP, dan Perpres yang dijadikan landasan hukum Renstra
1.3	Maksud dan Tujuan	c	Uraian Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
1.4	Sistematika Penulisan	d	Uraian Sistematika RENSTRA	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
2	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH			
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	a	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah: Berisi uraian tupoksi dan SO sesuai SOTK (tanpa nama pejabat)	Memuat SOTK dinas sesuai Perbup yang berlaku, penyajian uraian dapat seperti berikut: 1. Uraian sumber/



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			nomor perbup SOTK 2. Uraian kewenangan urusan yang diampu 3. Uraian Tugas dan fungsi sampai dengan Bidang dan UPT (jika ada) 4. Bagan Struktur Organisasi
		b . Sumber Daya Perangkat Daerah: Berisi uraian kondisi SDM terkait jumlah pegawai, kualifikasi dan analisis kecukupannya . Selain itu juga dijabarkan data Sumber Daya Aset dan Unit Usaha	A. Sumber Daya Manusia, Uraian yang masuk meliputi: 1. Jumlah pegawai yang menjadi PNS dan tidak 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			Terakhir B. Asset/Mo dal, Aset yang dimasukk an minimal: 1. Aset Bangunan Gedung 2. Aset Tanah 3. Aset Kendaraan Dinas 4. Aset lainnya seperti Traktor, Buldozer, Museum, dll, sesuai dengan Urusan yang diampu (jika ada) C. Unit usaha yang masih operasion al Unit usaha yang dimaksud untuk dicantum kan adalah UPT (jika ada) jika tidak ada sub bab dihilangk an saja
		c Kinerja . Pelayanan Perangkat	Kinerja pelayanan perangkat



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
		Daerah (termasuk capaian SPM sesuai tupoksinya)	daerah disajikan dengan format tabel dan dapat dilihat di lampiran modul ini yang berisikan: 1. Data evaluasi disajikan dengan urutan indikator Tujuan, indikator sasaran, indikator Program, 2. Setelah itu tambahka n Indikator SPM dan SDG's yang tersedia dan silahkan dicentang pada kolom (3), (4), atau (5), 3. Setelah data di tabel terisi lakukan analisis/i nterpretas i sekurang- kurangny a mengemu



NO	BAGIAN		ISI	KETERANGA N
				kakan ada/tidak nya kesenjang an/gap pelayanan , pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempeng aruhi keberhasil an pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempeng aruhi belum berhasilny a pelayanan tersebut. Hasil interpreta si ini ditujukan untuk menggam barkan potensi dan permasala han pelayanan Perangkat



NO	BAGIAN		ISI	KETERANGA N
				Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. 4. Analisis dilakukan dengan struktur pembahasan sebagai berikut: a. Indikator X Uraian indikator X dengan cakupan sebagaimana disebutkan pada point 3 diatas.
		d	Kelompok sasaran layanan	Berisikan sasaran layanan perangkat daerah misalnya: Bappeda kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah.
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	a	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Permasalahan yang disajikan pada sub bab ini bersumber dari beberapa poin diantaranya: A. hasil telaah kinerja penyelenggaraan urusan pada Bab II; B. permasalahan lain yang tidak tercatat secara terukur pada indikator kinerja; C. dan permasalahan yang muncul dari telaah-telaah dokumen terkait seperti KLHS, RTRW, Renstra Kementerian, dan



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			Telaah dokumen lainnya.
		b Isu Strategis .	Pada bagian ini menyajikan informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana. Langkah pertama, perumusan strategis dilakukan dengan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya, dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam merumuskan isu strategis adalah dengan cara melakukan perumpunan terhadap permasalahan



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			n Perangkat Daerah untuk diformulasikan menjadi bahasa isu strategis.
3	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
3.1	Tujuan & Sasaran Renstra PD 2025 - 2029	a Uraian Tujuan Renstra Perangkat Daerah	Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan memerhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, yang dapat merujuk terhadap Lampiran UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu sebagai agregat yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan jangka menengah daerah tujuan dan sasaran



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			renstra juga memerhatikan sasaran RPJMD (Bab 3 RPJMD) untuk memperoleh informasi positioning perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.
		b Uraian Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Tujuan dan sasaran perangkat daerah diuraikan dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu peran perangkat daerah dalam mendukung misi RPJMD dengan menguraikan sedikit tentang misi RPJMD secara spesifik, hingga selanjutnya diuraikan tujuan dan sasaran PD yang ditetapkan dengan memerhatikan beberapa hal yang



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			telah diuraikan diatas.
		c Matriks . Tujuan dan Sasaran Beserta Target Kinerja 2025-2029	Berikut setidaknya beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah: 1. Perhatikan masing-masing perangkat daerah mengampu berapa urusan 2. Untuk perangkat daerah yang terdiri dari beberapa urusan, direkomendasikan untuk tetap menggunakan 1 tujuan dengan menggabungkan substansi dari beberapa urusan tersebut menjadi 1 tujuan 3. Penetapan



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			Sasaran Renstra dapat mewakili / representatif terhadap masing-masing sasaran yang diampu 4. Baik Tujuan dan Sasaran diuraikan dengan kalimat kondisi (kalimat kinerja / pasif) bukan dengan bahasa kerja / kalimat aktif 5. Dipastikan terukur dalam jangka waktu 5 tahun 6. Interkoneksi antara Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra diperbolehkan sama baik uraian maupun indikator



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			ya, hanya untuk perangkat daerah tertentu yang secara direct pada Sasaran RPJMD cukup lugas perannya 7. Untuk Perangkat Daerah yang memiliki peran supportin g atau tidak secara langsung dan tersurat tertuang dalam Sasaran RPJMD disarankan menurun kan Tujuan Renstra dengan tetap memerhat ikan keselaras an yang menduku ng Sasaran RPJMD 8. Tujuan dan



NO	BAGIAN		ISI	KETERANGA N
				Sasaran RPJMD berada pada level intermediate outcome 9. Tujuan dan Sasaran RPJMD disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dengan kekhasan sesuai peran yang tertuang dalam NSPK
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD 2025 - 2029	a	Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	Strategi merupakan rencana tindakan komphensif yang berisikan langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD yang telah ditetapkan. Upaya/ langkah-langkah yang dimaksud di antaranya



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi, antara lain: 1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan



NO	BAGIAN		ISI	KETERANGAN
				ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta isu strategis di tahun-tahun sebelumnya untuk menentukan strategi yang akan dipilih. 3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan strategi yang paling dapat menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities dan tantangan



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			n/ threats). 4. Menyelaraskan strategi yang dipilih dengan Sasaran Pembangunan dengan kaidah '1 strategi bisa digunakan untuk lebih dari 1 sasaran atau lebih'.
		b Matriks . Pentahapan Arah Kebijakan Renstra-PD	Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang menjadi bentuk operasional dari Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas & fungsi PD serta selaras dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			Rumusan arah kebijakan bertujuan merasionalkan strategi yang telah dirumuskan agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam menentukan arah kebijakan Perangkat daerah memperhatikan arah kebijakan pada RPJMD serta memperhatikan beberapa poin berikut: 1. Mengidentifikasi dan Melakukan breakdown pada NSPK yang melekat pada perangkat daerah. 2. Breakdown NSPK dapat berupa penjabaran dari



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			masing-masing urusan yang diampu (sub-urusan yang sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota) 3. Mengidentifikasi arah kebijakan RPJMD yang sesuai dengan koridor NSPK yang telah dioperasionalisasi . 4. Merumuskan arah kebijakan Renstra PD yang selaras dengan Arah Kebijakan RPJMD dan operasionalisasi NSPK . 5. Menetapkan arah



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGA N
			kebijaka n dan beserta prioritas tahunan yang tercermi n dalam pentaha pan.
		c . Tabel Penterjemahan dan Integrasi Janji Politik	
4	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
4.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD	a . Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	Pada sub bab ini berisi mengenai Uraian Pengantar yang menjelaskan mengenai Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD (lebih baik bila dilengkapi dengan bagan/ gambar). Setelah uraian pengantar dirumuskan, selanjutnya disajikan Matriks/ Tabel Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGA N
			Sub Kegiatan Renstra PD dan dilengkapi dengan Matriks/ Tabel Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan (dengan memberikan narasi/ prolog ringkas penghubung sebelum matriks/ tabel). Program, Kegiatan, Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga diperlukan pernyataan secara eksplisit untuk menjelaskan bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD, yaitu sebagai pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030.
		b Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	Pada sub bab ini berisi mengenai Uraian Pengantar yang menjelaskan mengenai Sub Kegiatan Prioritas dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dan



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			dilanjutkan dengan menyajikan Matriks/ Tabel Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun langkah-langkah dalam merumuskan Sub Kegiatan Prioritas adalah sebagai berikut : 1. Melakukan identifikasi terhadap Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan PD pada casecadimg RPJMD atau Matriks/ Tabel Teknik Merumuskan Program Prioritas RPJMD; 2. Melakukan



NO	BAGIAN		ISI	KETERANGA N
				n Identifika si terhadap Kegiatan dan Sub Kegiatan yang relevan dalam menduku ng capaian Program Prioritas Pembang unan Daerah yang menjadi kewenang an PD dengan memperh atikan pada Outcome.
4.2	Kinerja Penyeleng garaan Bidang Urusan	a	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Pada sub bab ini berisi mengenai Uraian Pengantar yang menjelaskan mengenai Perumusan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD dan Matriks/ Tabel Indikator Kinerja Utama PD. Penentuan target



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tercermin melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.
		b Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Pada sub bab ini berisi mengenai Uraian Pengantar yang menjelaskan mengenai Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Matriks/ Tabel Indikator Kinerja Kunci. Penentuan target penyelenggaraan urusan tercermin melalui



NO	BAGIAN	ISI	KETERANGAN
			Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Indikator Kinerja Kunci yang dimasukkan hanya yang menjadi kewenangan/urusan dari Perangkat Daerah pengampu.
5	PENUTUP		
			Pada sub bab ini berisi kesimpulan penting Rencana Strategis disusun sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai RPJMD Kabupaten Pamekasan 2025–2029.

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025



BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

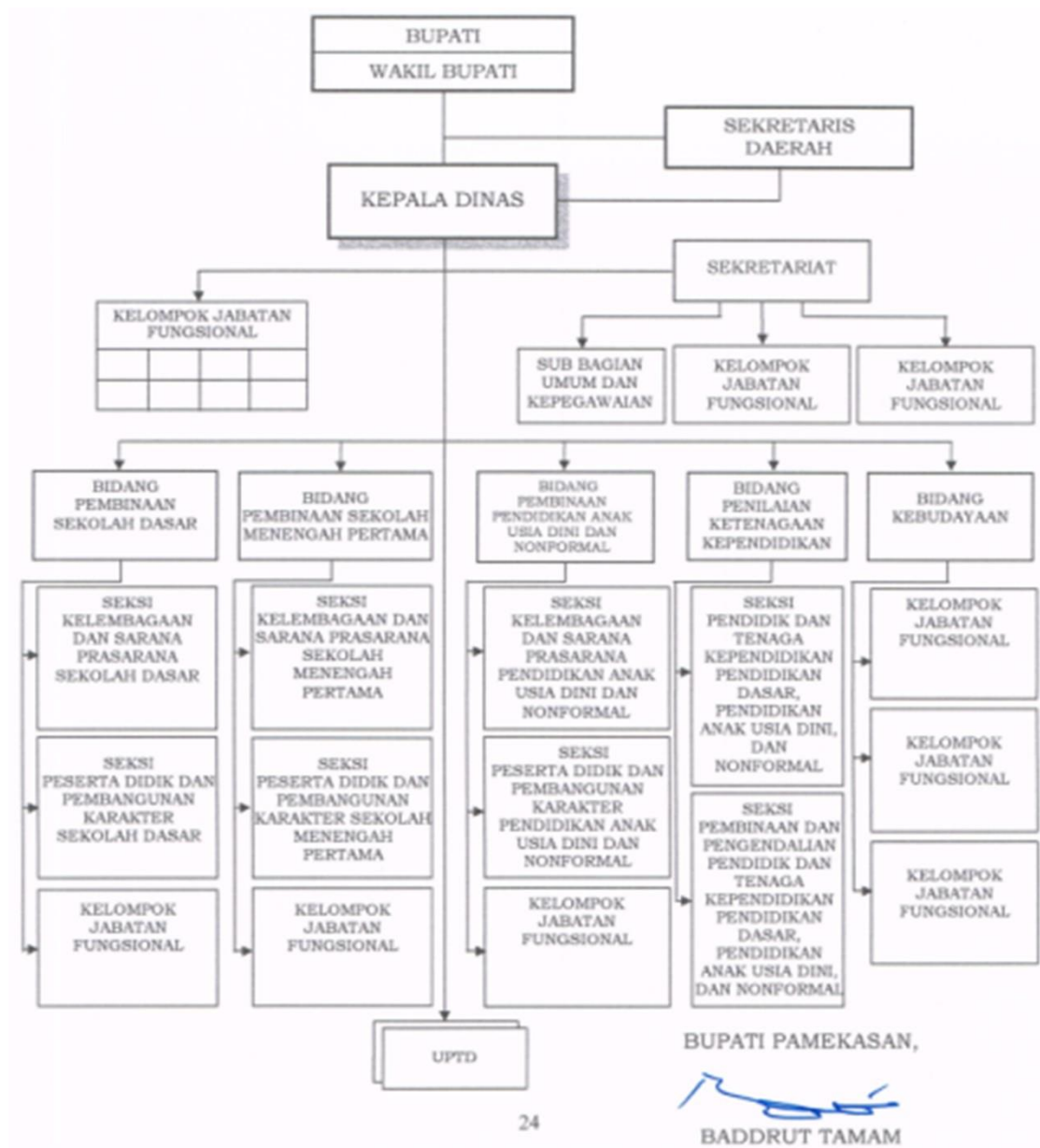
Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan menyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Pengarahan dan Pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- e. Pemberian Rekomendasi Perijinan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas



Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepala dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi
 - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi
 - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal, membawahi:
 - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Penilaian Ketenagaan Kependidikan, membawahi
 - a) Seksi Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan NonFormal;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
7. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - d) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi dari Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pemberian rekomendasi perizinan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Penilaian kinerja bawahan;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekertariat

Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:



- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan/aset;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, serta program dan kegiatan dinas;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi antar Bidang;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar Bidang;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar Bidang;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang;
- k. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi Dinas;
- l. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat;
- m. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi Sekretariat;
- n. Pengelolaan kinerja aparatur;
- o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Tugas Subbag Umum dan Kepegawaian adalah :

- a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan Dinas;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Dinas;
- d. Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Dinas;
- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. Menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- j. Menilai kinerja bawahan;
- k. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan pembinaan pendidikan dasar;



- b. Pengelolaan pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- c. Pengendalian perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. Pembinaan, pengembangan, dan perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten;
- e. Pengelolaan data bidang pembinaan pendidikan Sekolah Dasar;
- f. Perumusan bahan kebijakan bidang pembinaan pendidikan Sekolah Dasar;
- g. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pembelajaran pendidikan Sekolah Dasar;
- h. Pengembangan kelembagaan dan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;
- i. Pembinaan kesiswaan pada pendidikan Sekolah Dasar;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- k. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- l. Analisis data dan informasi kinerja Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- m. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- n. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- o. Penilaian kinerja bawahan;
- p. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



- 3.1 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru;
 - b. Melaksanakan pembnagunan ruang kelas baru;
 - c. Melaksanakan pembangunan ruang guru/Kepala sekolah/tata usaha;
 - d. Melaksanakan pembangunan ruang unit kesehatan sekolah;
 - e. Melaksanakan pembangunan perpustakaan sekolah;
 - f. Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
 - g. Melaksanakan pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
 - h. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas;
 - i. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/tata usaha;
 - j. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah;
 - k. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah;
 - l. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
 - m. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
 - n. Melaksanakan pengadaan mebel sekolah;
 - o. Melaksanakan pengadaan alat rumah tangga sekolah;
 - p. Melaksanakan pengadaan perlengkapan sekolah;
 - q. Melaksanakan pengadaan perlengkapan siswa;
 - r. Melaksanakan pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan;



- s. Melaksanakan pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- t. Melaksanakan pemeliharaan rutin rumah dinas Kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
- u. Melaksanakan pembangunan rumah dinas Kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
- v. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas;
- w. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/tata usaha;
- x. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah;
- y. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah;
- z. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- aa. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
- bb. Melaksanakan pengadaan alat praktik dan peraga siswa;
- cc. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
- dd. Melaksanakan penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- ee. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- ff. Mengolah data bidang kelembagaan pendidikan Sekolah Dasar;
- gg. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;
- hh. Menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur bidang kelembagaan, pemberdayaan, serta sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;
- ii. Menyusun rencana dan program kerja pengembangan dan pemberdayaan



- kelembagaan serta pengadaan sarana dan prasarana pada pendidikan Sekolah Dasar;
- jj. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi bidang kelembagaan, pemberdayaan, serta sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;
 - kk. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
 - ll. Menilai kinerja bawahan;
 - mm. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
 - nn. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - oo. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas:

- a. Menyediakan biaya personil peserta didik Sekolah Dasar;
- b. Mengadakan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
- c. Melaksanakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar;
- d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar;
- e. Mengolah data peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
- g. Menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter pada pendidikan Sekolah Dasar;
- h. Menyusun rencana dan program kerja pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada pendidikan Sekolah Dasar;



- i. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada pendidikan Sekolah Dasar;
- j. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- k. Menilai kinerja bawahan;
- l. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- m. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Pengelolaan pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pengendalian perizinan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. Pembinaan, pengembangan, dan perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten;
- e. Pengelolaan data bidang pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Perumusan bahan kebijakan bidang pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pembelajaran pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- h. Pengembangan kelembagaan dan perencanaan pengadaan sarana dan



prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

- i. Pembinaan kesiswaan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- k. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- l. Analisis data dan informasi kinerja Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- m. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- n. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- o. Penilaian kinerja bawahan;
- p. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru;
- b. Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru;
- c. Melaksanakan pembangunan ruang guru/Kepala sekolah/tata usaha;
- d. Melaksanakan pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah;



- e. Melaksanakan pembangunan perpustakaan sekolah;
- f. Melaksanakan pembangunan laboratorium;
- g. Melaksanakan pembangunan ruang serba guna/aula;
- h. Melaksanakan pembangunan asrama sekolah;
- i. Melaksanakan pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
- j. Melaksanakan pembangunan fasilitas parkir;
- k. Melaksanakan pembangunan kantin sekolah;
- l. Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah;
- m. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah;
- n. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
- o. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah;
- p. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah;
- q. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah;
- r. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat laboratorium;
- s. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula;
- t. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat asrama;
- u. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
- v. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat fasilitas parkir;
- w. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat kantin sekolah;
- x. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- y. Melaksanakan pengadaan mebel sekolah;



- z. Melaksanakan pengadaan alat rumah tangga sekolah;
- aa. Melaksanakan pengadaan perlengkapan sekolah;
- bb. Melaksanakan pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan;
- cc. Melaksanakan pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- dd. Melaksanakan pemeliharaan rutin rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah;
- ee. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
- ff. Mengolah data bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- gg. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- hh. Menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur bidang kelembagaan, pemberdayaan, serta sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- ii. Menyusun rencana dan program kerja pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan serta pengadaan sarana dan prasarana pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- jj. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi bidang kelembagaan, pemberdayaan, serta sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- kk. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- ll. Menilai kinerja bawahan;
- mm. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- nn. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan



- oo. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengadaan perlengkapan siswa;
- b. Menyediakan biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- c. Mengadakan perlengkapan dasar buku teks peserta didik;
- d. Mengadakan perlengkapan belajar peserta didik;
- e. Mengadakan pengadaan alat praktik dan peraga siswa;
- f. Mengadakan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa;
- g. Mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama;
- h. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama;
- i. Mengolah data peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- k. Menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- l. Menyusun rencana dan program kerja pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;



- m. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- n. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- o. Menilai kinerja bawahan;
- p. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- q. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Melaksanakan pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan;
- c. Melaksanakan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Melaksanakan penerbitan izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. Menyelenggarakan pembelajaran, peserta didik, dan pengembangan sarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembelajaran, peserta didik, dan



- pengembangan sarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- g. Melaksanakan penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur pembelajaran, peserta didik, dan pengembangan sarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
 - h. Melaksanakan pengelolaan informasi untuk program tindak lanjut bagi pengembangan pembelajaran, kegiatan peserta didik, dan pengembangan sarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
 - i. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
 - j. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
 - k. Analisis data dan informasi kinerja Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
 - l. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
 - m. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
 - n. Penilaian kinerja bawahan;
 - o. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
 - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.1 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana



Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Melaksanakan pembangunan sarana, Prasarana dan utilitas Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Melaksanakan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Melaksanakan pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Melaksanakan pengadaan mebel Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Melaksanakan pengadaan alat rumah tangga Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Melaksanakan pengadaan perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen Pendidikan Anak Usia Dini;
- k. Melaksanakan pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- l. Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
- m. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- n. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan;



- o. Melaksanakan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- p. Melaksanakan pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
- q. Melaksanakan pengadaan mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- r. Melaksanakan pengadaan alat rumah tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- s. Melaksanakan pengadaan perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- t. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
- u. Melaksanakan penilaian kelayakan usul perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- v. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- w. Melaksanakan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- x. Mengolah data bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- y. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- z. Menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur bidang kelembagaan, pemberdayaan, serta sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- aa. Menyusun rencana dan program kerja pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan serta pengadaan sarana dan



- prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- bb. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi bidang kelembagaan, pemberdayaan, serta sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - cc. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
 - dd. Menilai kinerja bawahan;
 - ee. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
 - ff. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - gg. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan nonformal sesuai dengan tugasnya.

5.2 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengadaan perlengkapan siswa Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Menyediakan biaya personil peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Melaksanakan pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Melaksanakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Menyediakan biaya personil peserta didik Nonformal/Kesetaraan;
- f. Melaksanakan pengadaan alat praktik dan peraga siswa Nonformal/Kesetaraan;
- g. Melaksanakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan sekolah Nonformal/Kesetaraan;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kegiatan peserta didik dan



pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;

- i. Menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
- j. Menyusun rencana dan program kerja pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
- k. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
- l. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- m. Menilai kinerja bawahan;
- n. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- o. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Penilaian Ketenagaan Kependidikan

Bidang Penilaian Ketenagaan Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Penilaian Ketenagaan Kependidikan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penilaian Ketenagaan Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penelaahan peraturan perundang-undangan tentang penilaian ketenagaan kependidikan;
- b. Pengolahan data tenaga pendidik dan kependidikan;
- c. Perumusan kebijakan bidang tenaga pendidik dan kependidikan;
- d. Perumusan rencana dan program kepangkatan, pengembangan karier, dan



- pengendalian tenaga pendidik dan kependidikan;
- e. Pelaksanaan program kepengkatan, pengembangan karier, dan pengendalian tenaga pendidik dan kependidikan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan program kepengkatan, pengembangan karier, dan pengendalian tenaga pendidik dan kependidikan;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Penilaian Ketenagaan Kependidikan;
 - h. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penilaian Ketenagaan Kependidikan;
 - i. Analisis data dan informasi kinerja Bidang Penilaian Ketenagaan Kependidikan;
 - j. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Penilaian Ketenagaan Kependidikan;
 - k. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
 - l. Penilaian kinerja bawahan;
 - m. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Bidang Penilaian Ketenagaan Kependidikan;
 - n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.1 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Nonformal

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan



- Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja kepangkatan;
 - c. Menyusun formasi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - d. Menyusun konsep usulan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala tenaga pendidik dan kependidikan;
 - e. Mengajukan usulan kenaikan pangkat tenaga pendidik dan kependidikan;
 - f. Menyusun konsep usulan pemberhentian dan pemensiunan pegawai;
 - g. Menyusun konsep usulan penerbitan kartu pegawai, kartu taspen, dan kartu istri dan suami;
 - h. Meneliti usulan cuti tenaga pendidik dan kependidikan;
 - i. Menyusun statistik pegawai tenaga pendidik dan kependidikan;
 - j. Menyusun bahan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan kepangkatan;
 - k. Menyusun rencana dan program kerja pengembangan karier;
 - l. Menyusun rencana pengadaan, penempatan, dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - m. Menyusun konsep pelaksanaan sertifikasi guru;
 - n. Menyusun konsep izin belajar bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - o. Menyusun konsep dan surat tugas tenaga pendidik dan kependidikan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke luar daerah;
 - p. Menyusun konsep promosi dan mutasi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - q. Menyusun bahan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pengembangan karier;
 - r. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
 - s. Menilai kinerja bawahan;



- t. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- u. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penilaian ketenagaan kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2 Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Nonformal
Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Nonformal mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- b. Menyusun rencana dan program pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan pembinaan disiplin kepada tenaga pendidik dan kependidikan;
- e. Menilai kinerja tenaga pendidik dan kependidikan;
- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan;
- g. Menyusun bahan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian;
- h. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- i. Menilai kinerja bawahan;
- j. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- k. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan



1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penilaian Ketenagaan Kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana program kegiatan pengembangan bidang kebudayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberian pengharaaan/penganugerahan bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan meliputi hak atas kekayaan intelektual, kerjasama luar negeri, penanaman nilai-nilai tradisional, serta pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan lembaga adat skala kabupaten;
- d. Pelaksanaan kerjasama bidang pembinaan, pengendalian, dan pengembangan kebudayaan;
- e. Pelaksanaan kebijakan standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian, serta penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten;
- f. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam kerjasama luar negeri;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian dan pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian serta apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
- h. Pelaksanaan kebijakan bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah,



- serta pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal, dan sejarah kebudayaan daerah;
- i. Penanganan perlindungan, pemilihan, dan pemanfaatan benda cagar budaya situs warisan budaya dunia;
 - j. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang kebudayaan;
 - k. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang penilaian kebudayaan;
 - l. Analisis data dan informasi kinerja bidang kebudayaan;
 - m. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kebudayaan;
 - n. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
 - o. Penilaian kinerja bawahan;
 - p. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Bidang Kebudayaan;
 - q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.



- b. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris dan Kepala Bidang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dengan keahlian dan kebutuhan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan sesuai struktur organisasi terdiri dari 24 Pelaksana Penyelenggara. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebanyak 43 Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II	: 1
2. Eselon III	: 5
3. Eselon IV	: 12
4. Pejabat fungsional	: 5
5. Staf/ Non Eselon	: 20

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan sebanyak 43 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-3	: 2
2. Sarjana S-2	: 11
3. Sarjana S-1	: 29
4. Diploma 3	: 0
5. SLTA	: 8
6. SLTP	: 1
7. SD	: 0

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG				JUMLAH BMD	SALDO AKHIR
KODE BARANG			NAMA BARANG		
(1)			(2)	(3)	(4)
1	1	7	Persediaan*)	0,00	0,00
1	3		Aset Tetap		
1	3	1	Tanah	436	98.377.825.900,00
1	3	2	Peralatan dan Mesin	47.752	202.577.629.058,13
1	3	3	Gedung dan Bangunan	3.811	580.473.510.785,61
1	3	4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	273	1.889.581.648,00
1	3	5	Aset Tetap Lainnya	423.966	108.745.484.731,04
1	3	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00
1	3	7	Akumulasi Penyusutan		294.129.384.885,61
1	5		Aset Lainnya		
1	5	2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
1	5	3	Aset Tidak Berwujud	63	2.893.985.373,00
1	5	4	Aset Lain-lain	35	1.193.881.350,00
1	5	5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		2.893.985.373,00
1	5	6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		400.813.914,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan



yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan**

No.	Indikator	Targ et SDG S	Targ et IKU/ IKK	Target Indika tor SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024
1	Indeks Kepuasan Unit Kerja			√	100%					100%					100.00%				
2	Prosentase kegiatan yang sesuai SOP			√	100%					100%					100.00%				
3	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik			√	100%					100%					100.00%				
4	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi			√															
5	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik			√															
6	Indeks Pendidikan			√	0.62	0.65	0.7	0.61	0.7	0.6	0.603	0.61	0.62	0.62	96.77%	92.77%	87.14%	101.64%	88.57%
7	Capaian SPM	√			74	74	76	98		74	84.6	98	93.0		100.0	114.	128.9	94.9	



No	Indikator	Targ et SDG S	Targ et IKU/ IKK	Target Indika tor SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024
	Pendidikan												9		0%	32%	5%	9%	
8	Rata-rata Lama Sekolah	√			6.75	6.55	6.65	6.88	7.155	6.69	6.7	6.88	7.15	7.17	99.11 %	102.29%	103.46%	103.92%	100.21%
9	Harapan Lama Sekolah	√			14.5	13.66	13.68	13.67	13.685	13.64	13.65	13.67	13.68	13.69	94.07 %	99.93%	99.93%	100.07%	100.04%
10	Nilai Pemajuan Kebudayaan		√	√		9.10%	9.56 %	8.74 %	7.43%		8.67 %	8.74 %	7.42 %	23.22 %		95.27%	91.42 %	84.90%	312.52%
11	Persentase peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya			√		82.35 %	88.24 %	76.47 %			76.47 %	76.47 %	88.24%			92.86%	86.66 %	115.39%	
12	Persentase kebudayaan daerah yang dikembangkan			√		71.43 %	80.00 %	51.43 %			60.00 %	51.43 %	64.44%			84.00%	64.29 %	125.30%	
13	Nilai SAKIP OPD	√		√	80	82	85	81.35		75.83	81.31	81.35	81.95		94.79 %	99.16%	95.71 %	100.74%	
14	APM SD	√	√	√					97.28					98.11					100.85%
15	APK SD	√	√	√					98.83					103.54					104.77%
16	APM SMP	√	√	√					80.5					76.43					94.94%
17	APK SMP	√	√	√					97.09					88.31					90.96%
18	APK PAUD	√	√	√					99.65					113					113.40%
19	Jumlah anak usia 5-6			√								30,521	30,990	31,654					



No	Indikator	Target SDG S	Target IKU/ IKK	Target Indikator SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD																		
20	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan			√								30,64 4	31,0 31	32,27 3					
21	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)			√								179	239	238					
22	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			√								30,11 2	29,3 94	27,44 7					
23	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri			√								30,11 2	29,3 94	27,44 7					



No	Indikator	Targ et SDG S	Targ et IKU/ IKK	Target Indika tor SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024
	dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan																		
24	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)			√								3,756	3,866	4,004					
25	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)			√								2,625	2,672	2,539					
26	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan			√								399	418	460					



No	Indikator	Target SDG S	Target IKU/ IKK	Target Indikator SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini																		
27	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah			√								983	655	225					
28	Jumlah anak			√								83,18	83,1	85,94					



No	Indikator	Target SDG S	Target IKU/ IKK	Target Indikator SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar											2	82	7					
29	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan			√								84,887	84,887	87,763					
30	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama			√								39,748	39,727	39,937					
31	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan			√								39,793	39,837	40,355					
32	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi			√								650	649	827					
33	Jumlah			√								53,20	56,9	59,22					



No	Indikator	Target SDG S	Target IKU/ IKK	Target Indikator SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah											2	17	6					
34	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			√								21,356	21,188	20,856					
35	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan			√								53,202	56,917	59,226					
36	Jumlah			√								21,13	21,1	20,85					



No	Indikator	Target SDG S	Target IKU/ IKK	Target Indikator SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan											1	88	6					
37	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar			√								4,284	4,760	4,770					
38	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			√								2,184	2,184	2,184					
39	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar			√								4,615	4,746	4,714					
40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah			√								1,828	1,843	1,777					



No	Indikator	Target SDG S	Target IKU/ IKK	Target Indikator SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	pertama																		
41	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar			√								952	1,428	1,431					
42	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			√								546	728	728					
43	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar			√								1,047	1,038	990					
44	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			√√								430	423	427					



No	Indikator	Target SDG S	Target IKU/ IKK	Target Indikator SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
45	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			√								1,868	1,945	2,858					
46	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			√								835	858	996					
47	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki			√								476	406	327					



No	Indikator	Target SDG S	Target IKU/ IKK	Target Indikator SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah																		
48	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			√								182	158	104					
49	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada			√								314	332	338					



No	Indikator	Target SDG S	Target IKU/ IKK	Target Indikator SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat																		
50	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			√								136	134	138					
51	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan			√								4	3,653	1,158					
52	Jumlah anak			√								4	5,04	4,284					



No	Indikator	Target SDG S	Target IKU/ IKK	Target Indikator SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/ Kota yang bersangkutan											6							
53	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)			√								12	12	11					
54	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			√								3,769	996	1,158					
55	Jumlah peserta didik pendidikan			√								3,769	996	1,158					



No	Indikator	Targ et SDG S	Targ et IKU/ IKK	Target Indika tor SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024
	kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan																		
56	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)			√								69	72	63					
57	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)			√								192	23	12					
58	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana			√								192	20	12					



No	Indikator	Targ et SDG S	Targ et IKU/ IKK	Target Indika tor SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024
	(S1)																		
59	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			√								476	406	327					
60	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1			√								23	15	17					
61	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan			√								14	14	13					
62	Jumlah			√								32	32	32					



No	Indikator	Target SDG S	Target IKU/ IKK	Target Indikator SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	cagar budaya yang terdata																		
63	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)			√								35	35	10					
64	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)			√								35	35	10					
65	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan			√								35	35	10					



No	Indikator	Targ et SDG S	Targ et IKU/ IKK	Target Indika tor SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024
	n (membangun karakter bangsa,meni ngkatkan ketahanan budaya,dan meningkatka n kesejahteraa n masyarakat)																		
66	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)			√								538	2,327	3,062					
67	Register cagar budaya (pendaftaran, pengasian, penetapan, pencatatan, pemeringkta n, penghapusa			√								1	14	13					



No	Indikator	Targ et SDG S	Targ et IKU/ IKK	Target Indika tor SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024
	n)																		
68	Perlindungan cagar budaya Kabupaten/ Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)			√								1	14	13					
69	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data			√								0	0	0					
70	Pengembang an cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)			√								0	0	0					
71	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan)			√								0	0	0					



No	Indikator	Target SDG S	Target IKU/ IKK	Target Indikator SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)																		
72	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			√								206	206	206					
73	a. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			√								5,114	8,095	5,424					
74	b. Peningkatan akses masyarakat dalam			√								0	0	0					



No	Indikator	Targ et SDG S	Targ et IKU/ IKK	Target Indika tor SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024
	penyelenggar aan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.																		
75	Pembentuka n tim pendaftaran cagar budaya Kabupaten/ Kota			√								5	1	1					
76	Pembentuka n tim ahli cagar budaya Kabupaten/ Kota			√								5	1	1					
77	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya			√								0	0	0					
78	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuma n			√								20	21	21					
79	Peningkatan kompetensi			√								0	0	0					



No	Indikator	Targ et SDG S	Targ et IKU/ IKK	Target Indika tor SPM /NSPK /LPPD	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024
	sdm cagar budaya dan permuseuman																		
80	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman			√								0	0	2					
81	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat			√								7	6	9					

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui gambaran mengenai pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan hingga tahun 2024. Secara umum, realisasi kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata capaian di atas 90%, bahkan beberapa indikator mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan pada periode 2020–2024 telah terlaksana dengan sangat baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan bidang kebudayaan, yang capaian kinerjanya rata-rata belum mencapai 90%.

**Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
Sebelum Perubahan																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	765,990,000					765,737,694					99.97 %						
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	41,640,000					41,597,400					99.90 %						
	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	724,350,000					724,140,294					99.97 %						
2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	274,610,000					273,776,695					99.70 %						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000					50,000,000					100.00 %						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	78,000,000					77,431,900					99.27 %						
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	20,000,000					20,000,000					100.00 %						



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	gedung kantor																	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (PAK)	100,000,000					99,734,795					99.73 %						
	Pengadaan Mebeleur (PAK)																	
	Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor (PAK)																	
	Pendidikan dan pelatihan formal	26,610,000					26,610,000					100.00 %						
	Pola Penataan Asset dengan System Program (Jadwal Ulang)																	
	Rehab berat gedung UPTD Kec Larangan & Pakong (jadwal Ulang)																	
	Rehab Berat Gedung Kantor UPTD Kecamatan																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Pengantenan																	
	Rehab Berat Gedung Kantor UPTD Kecamatan Palengaan																	
	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Dinas Pasean																	
	Pembangunan UPTD Waru (Jadwal Ulang)																	
	Pembangunan Laboratorium Komputer Akademi Komunitas Negeri																	
	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas (DPAL)																	
	Pembangunan Kantor Disdik (DPAL)																	
	Pembangunan Gedung Kantor																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	DISDIK (lanjutan)(DPAL)																	
3	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	47,500,000					46,638,400					98.19 %						
	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	35,000,000					34,998,400					100.00 %						
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,500,000					11,640,000					93.12 %						
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
	Penyusunan Kelas Jabatan Pegawai (PAK)																	
5	Program Pendidikan Dasar (SD)	56,084,181,396					54,854,687,232					97.81 %						



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	45,698,937,196					44,745,184,180.59					97.91 %						
	Pengadaan Sampul Raport SD Negeri																	
	Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	35,500,000					35,500,000					100.00 %						
	Penyelenggaraan Olimpiade Olah raga Siswa Nasional (O2SN)																	
	Penyelenggaraan Olimpiade Mata Pelajaran SD (OSN)																	
	Fasilitasi US dan UASBN SD/MI	487,800,000					484,138,200					99.25 %						
	Pelaksanaan BOSDA Sekolah	3,997,235,					3,772,732,0					94.38 %						



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Dasar	000					00											
	Pelaksanaan BOS Kinerja Sekolah Dasar (SD)(DPAL)	1,094,390,200					1,093,384,487					99.91 %						
	Pelaksanaan BOS AFIRMASI Sekolah Dasar (SD)																	
	Bintek Penggunaan Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) guru	78,315,000					78,285,000					99.96 %						
	Fasilitasi Pusat Pendidikan Sains	94,450,000					92,950,800					98.41 %						
	Pelaksanaan BOS AFIRMASI Sekolah Dasar (SD)(DPAL)	4,030,414,500					4,025,910,964					99.89 %						
	Pelaksanaan Uji Kompetensi Baca Al-Quran	356,700,000					347,542,100					97.43 %						
	Kompetisi Olah Raga	34,08					34,08					100.00 %						



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Siswa Nasional (KOSN) SD	0,000					0,000											
	Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD	141,909,500					140,729,500					99.17 %						
	Pengadaan Meubeler Sekolah Dasar																	
	Verifikasi Ijin Operasional SD	4,450,000					4,250,000					95.51 %						
	Pelaksanaan Promosi dan Mutasi Kepala Sekolah (PAK)	30,000,000					-					0.00%						
	Pencegahan gizi anak sekolah dalam rangka pencegahan stunting (PAK)																	
	Pengembangan pendidikan literasi sekolah (PAK)																	
	Pelatihan Pengembangan Perpustakaan Sekolah																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Berbasis TI Bagi SD																	
	Pengembangan Bahasa dan Budaya Madura																	
	Dana Operasional BOS																	
	Lomba Kader Tiwisada (DOKCIL)																	
	Seleksi Siswa Teladan SD																	
	Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri/Swasta																	
	Pengembangan SDN Pembina (SD Negeri Kanginan I)																	
	Pengadaan Alat Kesenian (BK Prov) (Jadwal Ulang)																	
6	Program Peningkatan Infrastruktur	28,038,2					25,688,996					91.62 %						



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	SD	58,901					,006											
	Peningkatan Sarana dan Prasarana SD	2,215,000,000					391,371,968					17.67 %						
	Rehab Ringan dan Sedang SD/MI/MD	9,165,950,000					8,982,836,500					98.00 %						
	Rehab ringan sedang dan RKB PAUD TK/RA,SD/MI/MD, SMP/MTs, SMA/MA & Sederajat (DPAL)																	
	Peningkatan Prasarana Sekolah Dasar																	
	Peningkatan Sarana SD																	
	Rehab ringan dan Sedang SD/MI/MD (DPAL)																	
	Peningkatan Prasarana Sekolah Dasar (DPAL)																	
	Rehabilitasi Prasarana	16,41					16,11					98.20 %						



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Belajar SD (DAK Reguler)	1,116,000					6,401,743											
	Peningkatan Sarana dan Prasarana SD (Optimalisasi DAK)(Jadwal Ulang)	46,192,901					-					0.00%						
	Peningkatan Infrastruktur SD	200,000,000					198,385,795					99.19%						
	Penyediaan/ Pengadaan Lahan Pendidikan Sekolah Dasar (PAK) (Jadwal Ulang)	-					-					0.00%						
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (PAK)																	
	Pembangunan Pagar SD																	
	Pavingisasi SDN Galis 1 (PAK)																	
	Pavingisasi SDN Majungan																	
7	Program Pendidikan Sekolah	14,308,2					13,718,469					95.88%						



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Menengah Pertama	74,600					,402											
	Pengembangan Kelas Digital SMP	360,160,000					323,400,000					89.79 %						
	Pengadaan Server UNBK SMP Swasta																	
	Bantuan Sarana Kesenian (Alat Kesenian) SMPN Pamekasan (DID)	50,000,000					49,400,000					98.80 %						
	Fasilitasi Kantin Kejujuran SMP (DID)	50,000,000					48,855,500					97.71 %						
	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan SMP (BOSDA)	1,050,000,000					974,073,502					92.77 %						
	Fasilitasi Penyelenggaraan UNAS SMP/MTs	132,845,000					131,375,792					98.89 %						
	Pelaksanaan BOS KINERJA SMP																	
	Pelaksanaan BOS																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	AFIRMASI SMP																	
	Penyelenggaraan Olimpiade Mata Pelajaran (OSN) SMP																	
	Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP	95,940,000					13,200,000					13.76%						
	Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP																	
	Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa nasional (FLS2N) SMP	36,100,000					35,100,000					97.23%						
	Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	10,180,218,000					9,727,534,192.84					95.55%						
	Pelaksanaan BOS Kinerja SMP (DPAL)	1,471,011,600					1,466,818,000					99.71%						



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Pelaksanaan BOS AFIRMASI SMP (Jadwal Ulang)	882,000,000					881,686,555					99.96 %						
	Seleksi dan Pengiriman Peserta Olimpiade TIK Tingkat Provinsi																	
	Olimpiade Bidang Keagamaan SD																	
8	Program Peningkatan Infrastruktur SMP	21,272,431,000					21,067,502,129					99.04 %						
	Pembangunan Pagar SMP Negeri 2 Proppo																	
	Pembangunan Pagar SMP Negeri 1 Palengan																	
	Pembangunan pagar SMP negeri 1 Tlanakan																	
	Pemasangan Paving SMPN 1 Galis (PAK)																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Sarana SMPN 3 Proppo																	
	Peningkatan Sarana & Prasarana Pendidikan SMP	672,000,000					558,562,908.60					83.12 %						
	Peningkatan sarana dan prasarana SMP																	
	Sewa Gedung SMPN 4 Pamekasan																	
	Rehab Ringan dan Sedang Gedung SMP/MTs	4,195,600,000					4,192,424,400					99.92 %						
	Peningkatan Prasarana SMP (PAK)																	
	Rehabilitasi Prasarana SMP AL HIKMAH (PAK)	50,000,000					49,454,743					98.91 %						
	Rehab Ringan dan Sedang Gedung SMP/MTs (DPAL)																	
	Pembangunan Jamban SMP INSAN	100,000,000					99,561,627					99.56 %						



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	PERWIRA (PAK)	0																
	Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK Reguler)	16,254,831,000					16,167,498,450					99.46 %						
	Pengadaan Sarana Pendidikan SMP (PAK)																	
	Pembangunan Gedung SMP Negeri 4 Pamekasan (DPAL)																	
	Pembangunan Pagar SMPN 4 Pamekasan (PAK)																	
	Rehab Pagar SMPN 1 Larangan																	
	Pengadaan/Pertambahan Tanah SMPN 6 Pamekasan (Jadwal Ulang)																	
9	Program Pendidikan Anak Usia Dini	670,850,000					588,003,535					87.65 %						
	Workshop																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Tenaga Pendidik PAUD																	
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	23,380,000					23,380,000					100.00 %						
	Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN)																	
	Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	256,500,000					256,011,135					99.81 %						
	Sosislisasi BOP PAUD (PAK)																	
	Pembinaan Pendidikan Karakter bagi Anak Usia Dini	52,500,000					52,500,000					100.00 %						
	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) Pendidikan Anak Usia Dini	199,000,000					195,842,400					98.41 %						
	Sosialisasi Lembaga PAUD	45,470,000					45,470,000					100.00 %						



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Percepatan Pencegahan Stunting Anak Usia Dini (PAK)	94,000,000					14,800,000					15.74 %						
	Pembinaan dan Pengembangan Guru (PAK)																	
10	Program Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini	5,281,164,000					5,230,149,982					99.03 %						
	Rehab Ringan dan Sedang Gedung PAUD, TK/RA	4,684,800,000					4,664,579,400					99.57 %						
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanggar Kegiatan Belajar	401,364,000					377,405,200					94.03 %						
	Peningkatan Sarana PAUD (PAK)	195,000,000					188,165,382					96.50 %						
	Rehab Ringan dan Sedang Gedung PAUD, TK/RA (DPAL)																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
11	Program Pendidikan Non Formal	308,625,000					283,918,375					91.99 %						
	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C	35,500,000					34,500,000					97.18 %						
	Penyelenggaraan UNAS Paket A, B, dan C (DID)	50,000,000					45,808,375					91.62 %						
	Pembinaan Kursus & Pelatihan	13,125,000					12,125,000					92.38 %						
	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional (BK Prov + DAU)	10,000,000					-					0.00%						
	Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF)(DID)	100,000,000					92,200,000					92.20 %						
	Pameran LKP dan PKBM																	
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Tutor Pendidikan Kesetaraan (PAK)	50,000,000					49,400,000					98.80 %						



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Meubelair Pendidikan Kesetaraan (PAK)	50,000,000					49,885,000					99.77 %						
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16,119,632,100					15,603,614,500					96.80 %						
	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	15,750,000					15,255,000					96.86 %						
	Penetapan Penilaian Angka Kredit/DUPA K	25,000,000					24,520,000					98.08 %						
	Pengembangan Kinerja Pengawas	44,168,600					38,251,800					86.60 %						
	Pengembangan Kinerja Penilik																	
	Pembinaan dan Pemeriksaan Guru PNS	10,273,500					10,268,500					99.95 %						
	Peningkatan Fungsi Guru Tidak Tetap (GTT)	15,246,840,000					14,749,719,200					96.74 %						



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Peningkatan Kinerja Guru TK/PAUD (BK Prov)	525,600,000					525,600,000					100.00 %						
	Peningkatan Kinerja Guru TK (BK Prov)	144,000,000					132,000,000					91.67 %						
	Peningkatan Kinerja Guru SD (BK Prov)	36,000,000					36,000,000					100.00 %						
	Peningkatan Kinerja Guru SMP (BK Prov)	72,000,000					72,000,000					100.00 %						
	Diklat Calon Kepala Sekolah																	
	Penyelenggaraan Diklat Calon Pengawas (DPAL)						-											
	Workshop Pembinaan dan pengembangan K13 Guru TK																	
	Peningkatan profesionalisme Guru SD																	
	Bimbingan Teknis KTI Guru																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Pelatihan Guru Pembina OSN																	
	Standarisasi Baca Al Quran Bagi Guru Agama																	
	Diklat K13 bagi Guru kelas 2 & 5 (PAK)																	
	Pemilihan Guru Berprestasi																	
	Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (Bk. Prov)																	
	Seleksi dan Pembinaan Penidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS Berprestasi (Bk. prov)																	
	Bimtek Penilaian Angka Kredit																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Berdasarkan Permenpan 16 Tahun 2009																	
	Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS																	
	Seleksi Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan (BK. Prov)																	
	Anugerah Konstitusi bagi Guru PKn (BK. Prov)																	
13	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,587,659,600					1,546,506,620					97.41 %						
	Pemilihan Guru OSN																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Keterampilan Kecakapan Hidup (Life Skill) (Bk. Prov)																	
	Pendukung Layanan Pengelolaan Dana BOS	118,875,000					118,011,350					99.27 %						
	Sosialisasi Sistem Informasi Tunjangan (SIMTUN)	45,720,000					45,720,000					100.00 %						
	BOP Madin (BK Provinsi)	100,000,000					84,530,000					84.53 %						
	Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	12,500,000					12,500,000					100.00 %						
	Pendukung Layanan Bantuan Siswa Miskin	48,725,000					48,224,900					98.97 %						
	Pelaksanaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional	979,200,000					971,366,400					99.20 %						



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Pengelolaan Website Pendidikan	75,000,000					69,844,170					93.13 %						
	Pengelolaan DAPODIK	50,000,000					44,171,200					88.34 %						
	Rapat Koordinasi Pendidikan	147,139,600					147,138,600					100.00 %						
	Penyusunan Profil Pendidikan																	
	Pendukung Layanan Program Indonesia Pintar (PIP)	10,500,000					5,000,000					47.62 %						
	Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan																	
	Dana Operasional BSM																	
	Lomba Pengelolaan Perpustakaan SD																	
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah																	
	Pendampingan USAID																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Prioritas																	
	Lomba Budaya Mutu SD																	
	Pelaksanaan Pendidikan Inklusi																	
	Pengembangan Kapasitas Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dasar (Penerusan Dana hibah)																	
	Pengembangan Kapasitas Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Pendamping)																	
	Sosialisasi dan Verifikasi Ijin Operasional Lembaga Pendidikan (Jadwal																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Ulang)																	
	Pengiriman Peserta O2SN - SD (PAK)																	
	Monitoring & Evaluasi BOS (PAK)																	
	Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa Baru Akademi Komunitas Negeri																	
	Pembinaan Karakter Siswa SMP, SMK dan SMA																	
	Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kuliah Perdana Akademi Komunitas Negeri																	
	Pemilihan Pelajar Terpuji (Jadwal Ulang)																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Pembangunan Pagar SMA Negeri 1 Waru																	
	Rehab Ringan, Sedang dan RKB PAUD, TK/RA, SD/MI/MD, SMP,MTs, (DID dan DAU) SMA/MA dan Sederajat (DID)																	
	Sarana Prasarana Peralatan Laboratorium Digital dan Pengembangan Sarana Penunjang Pembelajaran SMKN 1 Pamekasan (Bk Prov.)																	
	Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK (Bk. Prov) (DPAL)																	
	Jawara SMK (Bk. Prov)																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	(Jadwal Ulang)																	
	Bantuan Sarana Penunjang SMKN 1 Pamekasan (Bk. Prov)																	
	Pembangunan Pagar SMKN 1 Tlanakan (PAK)																	
	Biaya Pengelolaan dan Pemeliharaan Edotel SMKN 3 Pamekasan																	
	Karya Bhakti Pramuka PLB (Pendidikan Khusus)																	
	Porseni PLB																	
	Pembinaan Siswa di Luar Sekolah Tingkat SMP/SMA/S MK																	
	Olimpiade Mata Pelajaran (OSN PLB)																	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
Jumlah		144,759,176,597					139,668,000,570					96.48 %					4.462494012	4.065465467
Sesudah Perubahan																		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		475,366,704,173	446,394,834,149	438,267,805,643	455,922,745,806		420,268,235,495	429,924,295,368	420,677,003,885	446,892,457,946		88.41 %	96.31 %	95.99 %	98.02 %	0.987043724	1.021261376
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		44,728,000	109,627,000	111,942,000	92,275,000		44,008,000	106,101,300	111,328,650	90,261,300		98.39 %	96.78 %	99.45 %	97.82 %	1.432132725	1.423662237
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	70,000,000	52,900,000	55,000,000			67,710,300	52,867,600	54,433,900			96.73 %	99.94 %	98.97 %		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		6,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000		6,000,000	2,888,000	4,976,400	4,941,250		100.00 %	96.27 %	99.53 %	98.83 %	1.055555556	1.065800063



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4,000,000	2,000,000				4,000,000	1,928,000				100.00%	96.40%				
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		6,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000		5,760,000	2,878,000	4,976,400	4,886,000		96.00%	95.93%	99.53%	97.72%		1.070201493
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		4,000,000	2,000,000				3,760,000	1,918,000				94.00%	95.90%				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10,000,000					9,350,000					93.50%				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24,728,000	19,627,000	49,042,000	27,275,000		24,488,000	19,429,000	48,508,250	26,000,150		99.03%	98.99%	98.91%	95.33%	1.282857448	1.275365499
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		473,079,024,193	444,039,276,956	436,549,052,767	454,070,792,930		418,423,383,868	427,901,977,585	419,050,552,065	445,220,956,536		88.45%	96.37%	95.99%	98.05%	0.987294664	1.021473048
	Penyediaan		473,		436,								88.45	96.37	95.99	98.05	0.98729	1.0214



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Gaji dan Tunjangan ASN		079,024,193	444,039,276,956	549,052,767	454,070,792,930		418,423,383,868	427,901,977,585	419,050,552,065	445,220,956,536		%	%	%	%	4664	73048
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		392,521,000	110,000,000	172,800,000			310,035,000	92,557,250	145,120,500			78.99%	84.14%	83.98%		0.617049625	0.622145979
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		151,000,000	30,000,000				110,453,000	25,959,250				73.15%	86.53%				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		176,000,000	40,000,000				134,261,000	28,987,500				76.28%	72.47%				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		65,521,000	40,000,000	172,800,000			65,321,000	37,610,500	145,120,500			99.69%	94.03%	83.98%		1.643497098	1.478096623
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2,000,000					1,450,000					72.50%		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2,000,000					1,450,000					72.50%		
	Administrasi Umum		627,	540,	158,	433,		358,5	524,6	154,2	397		57.16%	97.00%	97.33%	91.61%	1.297465295	1.444449149



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Perangkat Daerah		239,000	850,100	459,000	725,000		59,900	29,500	31,500	,332,500							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		184,000,000	194,989,600		100,000,000		163,083,000	193,680,000		96,397,900		88.63%	99.33%		96.40%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4,186,000			100,000,000		3,886,000			98,620,200		92.83%			98.62%		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		91,254,000	45,000,000	75,199,000			22,865,000	37,974,000	75,132,000			25.06%	84.39%	99.91%		0.721405986	1.213101072
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		3,000,000	3,000,000		10,000,000					3,350,000		0.00%	0.00%		33.50%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250,000,000	250,000,000	10,000,000	96,000,000		86,220,000	250,000,000	10,000,000	96,000,000		34.49%	100.00%	100.00%	100.00%	3.546666667	4.179853089
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		94,799,000	33,860,500	42,360,000	100,000,000		82,505,900	29,263,500	39,319,500	75,344,000		87.03%	86.42%	92.82%	75.34%	1.32297163	1.204839779
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis			14,000,000	30,900,000	27,725,000			13,712,000	29,780,000	27,620,400			97.94%	96.38%	99.62%		



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Elektronik pada SKPD																	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		476,721,000	945,099,100	638,769,100	1,168,952,876		447,744,477	803,435,933	600,453,994	1,083,911,210		93.92 %	85.01 %	94.00 %	92.72 %	1.496127719	1.448972567
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		129,193,000	136,971,100	211,970,100	240,000,000		121,861,477	133,707,933	185,816,994	176,484,334		94.33 %	97.62 %	87.66 %	73.54 %	1.246664632	1.145570167
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		347,528,000	808,128,000	426,799,000	928,952,876		325,883,000	669,728,000	414,637,000	907,426,876		93.77 %	82.87 %	97.15 %	97.68 %	1.676683995	1.620905176
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		321,470,980	249,980,993	236,782,776	155,000,000		265,244,250	95,593,800	215,317,176	98,546,400		82.51 %	38.24 %	90.93 %	63.58 %	0.79314253	1.023499032
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		82,683,000	45,000,000	76,010,800	75,000,000		34,198,250	44,251,300	54,545,200	68,976,400		41.36 %	98.34 %	71.76 %	91.97 %	1.073359362	1.26372026



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Operasional atau Lapangan																	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		21,988,000	14,981,000		30,000,000		16,059,500	14,981,000		29,570,000		73.04 %	100.00 %		98.57 %		
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		216,799,980	189,999,993	160,771,976	50,000,000		214,986,500	36,361,500	160,771,976			99.16 %	19.14 %	100.00 %	0.00 %	0.677850537	1.530207659
	Penataan Organisasi		425,000,000	400,000,000	400,000,000			419,260,000	400,000,000	400,000,000			98.65 %	100.00 %	100.00 %		0.647058824	0.651353973
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		425,000,000	400,000,000	400,000,000			419,260,000	400,000,000	400,000,000			98.65 %	100.00 %	100.00 %		0.647058824	0.651353973
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		166,843,744,521	235,826,523,150	243,822,476,975	231,334,703,081		146,508,597,839	219,866,820,823	237,985,016,075	211,975,03,178		87.81 %	93.23 %	97.61 %	91.63 %	1.132048935	1.157941369
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		109,252,590,592	155,440,775,750	138,962,998,300	137,040,068,881		106,431,516,588	141,827,297,145	135,719,046,463	125,066,844,334		97.42 %	91.24 %	97.67 %	91.26 %	1.100973543	1.070337738
	Pembanguna												98.89	93.69	99.58	79.16	1.32990	1.2105



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	n Ruang Kelas Baru		11,232,999,880	3,241,027,250	5,035,292,900	10,813,720,946		11,108,423,295	3,036,568,300	5,014,069,020	8,559,701,378		%	%	%	%	759	74266
	Pembangunan Ruang Guru		921,286,560	798,240,000	569,616,000	221,426,500		892,156,780	558,768,000	569,616,000	219,926,500		96.84%	70.00%	100.00%	99.32%	0.656253279	0.677273885
	Pembangunan Ruang UKS		1,561,106,880		1,635,007,000	1,074,318,000		1,547,181,151		1,635,007,000	920,826,000		99.11%		100.00%	85.71%		
	Pembangunan Ruang Perpustakaan		221,424,320	419,120,000	1,568,476,000	856,341,600		215,313,156	293,384,000	1,568,476,000	783,986,051		97.24%	70.00%	100.00%	91.55%	2.060371506	2.402861763
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1,742,828,640	8,044,821,600	20,088,458,250	17,130,599,631		1,730,056,461	6,942,300,500	20,045,545,946	15,322,450,808		99.27%	86.30%	99.79%	89.44%	2.655260669	2.55486379
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		14,149,134,196	4,146,149,400	5,994,090,000	11,665,484,000		13,315,498,424	3,865,716,900	5,994,090,000	10,302,59,442		94.11%	93.24%	100.00%	85.98%	1.228298921	1.171417274
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru		1,053,116,764		422,655,000	161,879,000		1,009,224,817		422,655,000	115,565,300		95.83%		100.00%	71.39%		
	Rehabilitasi Sedang/Berat		1,71	121,	403,	767,		1,705,	121,9	403,32	575,		99.29%	100.00%	100.00%	75.00%	1.760095565	1.601785536



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Perpustakaan		7,850,336	940,000	323,000	019,408		659,372	40,000	3,000	264,556							
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		276,746,958	740,000,000	3,102,058,500	1,207,427,000		271,866,833	735,851,500	3,072,045,373	939,502,504		98.24%	99.44%	99.03%	77.81%	2.418375953	2.395767229
	Pengadaan Mebel Sekolah		180,300,000			915,196,266		179,162,500			677,876,632		99.37%			74.07%		
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		100,000,000	75,000,000	359,100,000	450,000,000		100,000,000	-	356,575,000	438,420,000		100.00%	0.00%	99.30%	97.43%	2.263710944	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		1,169,407,500					1,147,996,500					98.17%					
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		3,006,900,000	42,820,000	3,050,000,000	800,000,000		2,961,367,000	42,039,400,000	3,044,552,000	774,764,000		98.49%	98.18%	99.82%	96.85%	4.858034493	4.840946966
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		467,005,800	450,000,000	523,206,250	825,000,000		401,433,100	448,769,300	521,465,350	815,573,619		85.96%	99.73%	99.67%	98.86%	1.234360682	1.281303768



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		497,562,500	380,000,000	489,697,400			478,827,549	294,407,735	462,202,150			96.23 %	77.48 %	94.39 %		0.684133506	0.728263389
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		655,840,000	317,200,000	550,000,000	460,000,000		554,416,400	316,724,310	547,645,790	457,564,038		84.54 %	99.85 %	99.57 %	99.47 %	1.017980001	1.045293025
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		16,276,000,00	17,103,807,500	17,450,650,00	15,952,651,250		16,067,502,500	16,302,376,600	14,615,992,750	14,104,368,170		98.72 %	95.31 %	83.76 %	88.41 %	0.995099097	0.958723158
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		270,000,000	70,000,000	120,000,000	655,000,000		184,665,750	48,580,000	75,395,150	435,889,750		68.39 %	69.40 %	62.83 %	66.55 %	2.477292769	2.532150718
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		1,497,500,000	16,472,500,000	8,985,000,000	9,625,000,000		1,494,975,000	8,874,450,000	8,984,250,000	9,434,458,400		99.83 %	53.87 %	99.99 %	98.02 %	4.205561458	2.666223224
	Pengelolaan												98.18	96.29	99.67	95.82	1.05872	1.0503



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Dana BOS Sekolah Dasar		52,010,71,009	60,180,970,000	61,402,600,000	61,327,670,000		51,065,790,000	57,948,060,000	61,199,836,516	58,763,827,584		%	%	%	%	7071	61268
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		245,509,249	60,000,000			-	-					0.00%	0.00%				
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				7,213,768,000	2,131,335,280				7,186,304,417	1,696,619,602				99.62%	79.60%		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		29,746,565,872	55,134,036,500	68,872,819,200	54,004,187,200		13,752,808,968	54,075,188,665	66,594,940,339	50,237,175,644		46.23%	98.08%	96.69%	93.02%	1.295587435	1.972610628
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				275,000,000	263,260,000				275,000,000	263,260,000				100.00%	100.00%		
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				906,000,000	130,469,000				906,000,000	130,469,000				100.00%	100.00%		
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		400,000,000	1,460,000,000	4,950,000		-	1,459,470,300	4,950,000				0.00%	99.96%	100.00%		1.217796804	
	Pembangunan														100.0	96.19		



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	n Laboratorium				2,545,000,000	1,552,255,000				2,545,000,000	1,493,095,000				0%	%		
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		994,688,000	10,255,750,000	4,579,825,000	2,973,440,000		-	10,254,490,800	4,576,676,700	2,783,350,675		0.00%	99.99%	99.93%	93.61%	3.80210956	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah		2,225,000,000	1,400,000,000	1,605,000,000			-	1,392,954,300	1,598,264,300			0.00%	99.50%	99.58%		0.591880685	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		8,735,146,000	6,444,252,000	8,259,562,000	3,386,682,000		-	6,158,116,000	8,143,730,000	3,086,591,650		0.00%	95.56%	98.60%	91.14%	0.809821481	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		752,145,000	448,350,000	395,000,000			357,456,448	448,350,000	395,000,000			47.52%	100.00%	100.00%		0.49236777	0.711762272
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		915,200,000	1,027,257,000	390,000,000			434,083,320	1,027,257,000	390,000,000			47.43%	100.00%	100.00%		0.500697245	0.91538304
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah				362,500,000					362,500,000					100.00%			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit				250,000,000					250,000,000					100.00%			



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Kesehatan Sekolah				000													
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		323,022,000	1,649,410,000	1,410,000,000	428,000,000		-	1,649,410,000	1,373,005,000	364,911,825		0.00%	100.00%	97.38%	85.26%	2.088193982	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		600,000,000	300,000,000	60,000,000	107,000,000		-	297,000,000	43,350,000	101,944,000		0.00%	99.00%	72.25%	95.27%	0.827777778	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		545,750,000		16,843,79,700	11,387,784,700		10,000,000		15,371,298,000	10,612,662,500		1.83%		91.26%	93.19%		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		1,347,708,796	2,465,000,000	375,000,000	741,550,000		1,315,799,200	2,403,750,000	374,319,000	709,990,000		97.63%	97.52%	99.82%	95.74%	1.319542206	1.293103532
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		105,000,000	275,000,000	344,000,000	379,850,000		-	233,065,800	280,918,500	274,819,920		0.00%	84.75%	81.66%	72.35%	1.658057275	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan		50,000,000	45,000,000	25,000,000			24,683,000	40,615,200	22,165,000			49.37%	90.26%	88.66%		0.485185185	0.730401413



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Sekolah Menengah Pertama																	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		265,275,000	450,000,000	374,332,500	405,982,500		3,600,000	355,035,200	244,486,500	303,441,982		1.36%	78.90%	65.31%	74.74%	1.204251114	33.516885
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		78,500,000	75,000,000	150,000,000	215,000,000		-	59,534,600	86,620,000	160,841,500		0.00%	79.38%	57.75%	74.81%	1.462915782	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		126,600,000	679,167,500	175,000,000	167,650,000		-	647,551,400	104,270,200	132,559,000		0.00%	95.34%	59.58%	79.07%	2.193446864	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		11,991,845,031	28,079,850,000	29,218,070,000	28,618,890,000		11,607,187,000	27,568,588,065	28,921,887,139	26,864,756,892		96.79%	98.18%	98.99%	93.87%	1.453868912	1.451030732
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		4,507,045					-					0.00%					



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah		286,179,000	80,000,000	325,500,000			-	80,000,000	325,500,000			0.00%	100.00%	100.00%		1.449431773	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru					2,954,000,000					2,664,474,200					90.20%		
	Pengadaan Mebel Sekolah					292,374,000					290,007,500					99.19%		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		24,836,885,200	24,012,210,900	33,399,718,275	37,416,407,000		24,194,670,783	22,794,578,184	33,092,433,773	33,993,468,700		97.41%	94.93%	99.08%	90.85%	1.159334925	1.140375925
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		189,984,800					184,008,388					96.85%					
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		423,500,400	367,564,150	8,663,339,000	11,770,416,000		339,911,495	361,178,750	8,238,327,400	10,185,665,000		80.26%	98.26%	95.09%	86.54%	8.59872105	8.369499905
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana		6,791,000,000	5,469,347,000	5,397,997,625	6,697,428,000		6,638,686,500	5,436,298,684	5,239,743,345	5,567,724,400		97.76%	99.40%	97.07%	83.13%	1.011020294	0.948440148



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	dan Utilitas PAUD																	
	Pengadaan Mebel PAUD		198,000,000	50,000,000		13,480,000		193,822,000	-		13,480,000		97.89%	0.00%		100.00%		
	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD		-															
	Pengadaan Perlengkapan PAUD		-		80,000,000					80,000,000					100.00%			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		105,000,000	166,149,750	99,606,650	382,041,000		104,042,400	157,659,750	94,744,500	228,847,200		99.09%	94.89%	95.12%	59.90%	2.005791582	1.510566094
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		-		42,625,000	200,000,000				42,079,200	199,407,000				98.72%	99.70%		
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		50,000,000	25,000,000	80,100,000			42,540,000	25,000,000	70,620,500			85.08%	100.00%	88.17%		1.234666667	1.137500727
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			180,000,000	250,000,000				176,400,000	247,862,000				98.00%	99.14%			
	Pengembangan Karir		-	40,000,000	29,800,000	251,000,000			37,460,000	29,475,000	247,000,000			93.66%	98.91%	98.43%		



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			00,000	00,000	432,000			5,000,000		486,500							
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		250,000,000	260,000,000	250,000,000	500,000,000		234,060,000	224,500,000	245,833,000	427,742,700		93.62%	86.35%	98.33%	85.55%	1.333846154	1.264717645
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		16,829,400,000	17,454,150,000	18,506,250,000	17,441,610,000		16,457,600,000	16,376,076,000	18,803,748,828	16,993,320,900		97.79%	93.82%	101.61%	97.43%	1.013290597	1.01567045
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD					160,000,000					129,795,000					81.12%		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		3,007,702,857	1,239,500,000	2,586,941,200	2,874,040,000		2,129,601,500	1,169,756,829	2,578,595,500	2,678,014,500		70.80%	94.37%	99.68%	93.18%	1.203391008	1.264075265
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		185,560,000					-					0.00%					



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembanguna n Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/K esetaraan			230,000,000				-	228,938,829					99.54 %				
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/K esetaraan		75,000,000					74,250,000					99.00 %					
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/K esetaraan		-					-										
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/K esetaraan		127,500,000	100,000,000	100,000,000	454,400,000		96,985,000	100,000,000	100,000,000	454,400,000		76.07 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.109437908	2.191695761
	Penyelenggara an Proses Belajar Nonformal/K esetaraan		357,142,857	50,000,000	554,000,000	100,000,000		356,750,000	48,732,000	547,789,000	62,360,000		99.89 %	97.46 %	98.88 %	62.36 %	3.800168472	3.830429072
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan		-	25,000,000	25,000,000			-	25,000,000	24,986,000				100.00 %	99.94 %			



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		30,000,000	25,000,000	15,831,200	60,000,000		20,838,500	25,000,000	15,348,500	52,320,000		69.46%	100.00%	96.95%	87.20%	1.752188556	1.740814879
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		20,000,000	40,000,000	50,000,000	139,000,000		16,128,000	35,425,000	48,400,000	117,425,000		80.64%	88.56%	96.80%	84.48%	2.01	1.9962979
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		2,212,500,000	769,500,000	1,842,110,000	2,095,640,000		1,564,650,000	706,661,000	1,842,072,000	1,971,070,000		70.72%	91.83%	100.00%	94.06%	1.293110654	1.376132298
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					25,000,000					20,439,500					81.76%		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN		231,000,000	90,000,000	78,537,500	-		226,078,100	89,303,850	78,329,750	-		97.87%	99.23%	99.74%		0.420749759	0.424042771



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	KURIKULUM		000	00	00			0										
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		231,000,000	90,000,000	78,537,500	-		226,078,100	89,303,850	78,329,750	-		97.87%	99.23%	99.74%		0.420749759	0.424042771
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		131,000,000	50,000,000	42,556,250			127,808,600	49,450,700	42,509,000			97.56%	98.90%	99.89%		0.410934796	0.415511992
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		100,000,000	40,000,000	35,981,250			98,269,500	39,853,150	35,820,750			98.27%	99.63%	99.55%		0.433177083	0.434789357
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		3,137,510,000	558,400,000	1,133,601,250	675,600,000		558,200,000	530,400,000	938,302,500	627,600,000		17.79%	94.99%	82.77%	92.90%	0.934680162	1.129370486
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,		3,137,510,000	558,400,000	1,133,601,250	675,600,000		558,200,000	530,400,000	938,302,500	627,600,000		17.79%	94.99%	82.77%	92.90%	0.934680162	1.129370486



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		583,200,000	558,400,000	701,600,000	675,600,000		558,200,000	530,400,000	670,600,000	627,600,000		95.71%	94.99%	95.58%	92.90%	1.058954944	1.050134729
	Penataan Pendistribusi an Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2,554,310,000		432,001,250			-		267,702,500			0.00%		61.97%			
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		-	50,000,000	170,000,000	50,000,000		-	23,388,500	165,204,500	47,365,000			46.78%	97.18%	94.73%		



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		-	20,000,000	20,000,000	-		-	-	15,674,500	-			0.00%	78.37%			
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			20,000,000	20,000,000			-	-	15,674,500				0.00%	78.37%			
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		-					-										
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		20,000,000	30,000,000	150,000,000	50,000,000		-	23,388,500	149,530,000	47,365,000		0.00%	77.96%	99.69%	94.73%	2.27777	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		20,000,000	30,000,000	150,000,000	50,000,000		-	23,388,500	149,530,000	47,365,000		0.00%	77.96%	99.69%	94.73%	2.277777778	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		83,000,000	40,000,000	37,850,000			81,498,700	39,758,100	37,723,850			98.19%	99.40%	99.67%		0.476059237	0.478890518
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		83,000,000	40,000,000	37,850,000			81,498,700	39,758,100	37,723,850			98.19%	99.40%	99.67%		0.476059237	0.478890518
	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		83,000,000	40,000,000	37,850,000			81,498,700	39,758,100	37,723,850			98.19%	99.40%	99.67%		0.476059237	0.478890518



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		325,000,000	259,000,000	452,506,000	140,000,000		172,823,000	251,575,000	445,452,884	85,163,000		53.18%	97.13%	98.44%	60.83%	0.951146218	1.139173149
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		50,000,000	60,000,000	223,812,500	140,000,000		47,823,000	55,036,000	217,350,884	85,163,000		95.65%	91.73%	97.11%	60.83%	1.851910643	1.830632984
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		-	30,000,000	129,812,500	50,000,000		-	30,000,000	124,425,884	45,430,000			100.00%	95.85%	90.86%		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		50,000,000	30,000,000	94,000,000	90,000,000		47,823,000	25,036,000	92,925,000	39,733,000		95.65%	83.45%	98.86%	44.15%	1.563593381	1.55425013
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah		150,000,000	129,000,000	158,693,500	-		-	126,539,000	158,102,000	-		0.00%	98.09%	99.63%		0.69672739	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Kabupaten/ Kota																	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		150,000,000	111,000,000	113,693,500			-	108,539,000	113,666,000			0.00%	97.78%	99.98%		0.588088589	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		-	18,000,000	45,000,000			-	18,000,000	44,436,000				100.00%	98.75%			
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		125,000,000	70,000,000	70,000,000	-		125,000,000	70,000,000	70,000,000	-		100.00%	100.00%	100.00%		0.52	0.52
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		125,000,000	70,000,000	70,000,000			125,000,000	70,000,000	70,000,000			100.00%	100.00%	100.00%		0.52	0.52
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR		300,000,000	450,000,000	200,000,000	496,000,000		-	443,917,500	199,924,600	479,117,364		0.00%	98.65%	99.96%	96.60%	1.474814815	



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	BUDAYA																	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota		300,000,000	450,000,000	200,000,000	496,000,000		-	443,917,500	199,924,600	479,117,364		0.00%	98.65%	99.96%	96.60%	1.474814815	
	Pelindungan Cagar Budaya		300,000,000	450,000,000	200,000,000	496,000,000		-	443,917,500	199,924,600	479,117,364		0.00%	98.65%	99.96%	96.60%	1.474814815	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			700,000,000	735,000,000	735,000,000			678,887,000	727,580,324	593,565,991			96.98%	98.99%	80.76%		
	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota			700,000,000	735,000,000	735,000,000			678,887,000	727,580,324	593,565,991			96.98%	98.99%	80.76%		
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			210,000,000	210,000,000	210,000,000			206,382,000	208,811,500	83,615,500			98.28%	99.43%	39.82%		
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			424,000,000	459,000,000	525,000,000			407,205,000	453,505,500	509,950,491			96.04%	98.80%	97.13%		



NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			66,000,000	66,000,000				65,300,000	65,263,324				98.94 %	98.88 %			
	Jumlah		645,986,958,694	683,218,757,299	684,897,777,368	689,354,048,887		567,815,433,134	650,725,541,641	661,254,538,368	660,700,772,479		87.90 %	95.24 %	96.55 %	95.84 %	1.022199839	1.053786299

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025



Secara umum rasio antara realisasi dan anggaran sudah diatas 90 persen selama 5 tahun terakhir, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio dalam katagori baik sebab mendekati 100 persen. Rasio tidak maksimal ini disebabkan antara lain ada kelebihan anggaran dalam pencapaian target kinerja serta adanya selisih harga yang dianggarkan dengan harga barang yang ada di pasaran. Diantara permasalahan yang terjadi pada pengelolaan pendanaan adalah mekanisme regulasi perencanaan anggaran yang berubah-ubah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berpengaruh besar terhadap pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena harus dilakukan penyesuaian target kinerja dengan jumlah dana yang tersedia.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Setiap layanan pemerintah wajib melaksanakan layanan baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholders terkait. Kelompok sasaran layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan:
 1. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai mitra dalam pendampingan penerapan Kurikulum Merdeka dan Pencanaan Berbasis Data
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai mitra dalam penerapan pelayanan pendidikan
 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sebagai mitra dalam pelayanan ijin operasional lembaga pendidikan
 4. Dinas Kesehatan sebagai mitra dalam pelayanan rutin kesehatan bagi peserta didik dari jenjang PAUD sampai dengan SMP
2. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
PDAM sebagai mitra lembaga pendidikan dalam penyediaan air bersih
3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Kerjasama dengan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Permasalahan yang menjadi urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2. 4 Identifikasi Permasalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Terdapat sekolah yang rusak dan memerlukan Ruang kelas baru namun belum mendapatkan bantuan berupa pembangunan ataupun rehabilitasi	Pendataan kondisi riil sarana dan prasarana pendidikan kurang optimal	Regulasi untuk rehab sedang/berat tidak bisa dianggarkan melalui Anggaran Rutin BOSP
2	Rendahnya Nilai literasi dan numerasi sekolah pada rapor pendidikan	Sekolah kurang menerapkan solusi dari rapor pendidikan untuk peningkatan Nilai Literasi dan nilai numerasi	Minimnya pendampingan kepada sekolah yang berfokus pada peningkatan nilai literasi dan nilai numerasi di sekolah
3	Masih banyak lembaga PAUD dan Kesetaraan yang belum memperpanjang ijin operasional sehingga 8 standar pendidikan belum terpenuhi	Kurangnya kesadaran lembaga dalam memperbaiki administrasi ijin operasional	Dalam beberapa regulasi pemberian bantuan hibah, ijin operasional tidak dijadikan syarat utama
4	Rendahnya disiplin kerja ASN guru dan banyaknya angka perceraian pada ASN guru	Kurangnya pemahaman guru tentang peran dan tugasnya baik di sekolah maupun di masyarakat	Pembinaan dan pengendalian, serta pemberian sanksi kurang optimal
5	Kurang terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	Kurangnya jumlah pendidik yang memiliki ijazah linier	Regulasi dan persyaratan dalam perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan yang semakin sulit
6	Masih rendahnya kualitas SDM kesenian	Kurangnya kesadaran SDM kesenian untuk mengembangkan kemampuannya	Fasilitasi dalam upgrading kualitas DSDM kesenian masih belum optimal
7	Masih lemahnya perlindungan dan pelestarian cagar budaya	Pencatatan objek yang diduga cagar budaya kurang optimal	Fasilitasi untuk pemeliharaan cagar budaya yang telah tercatat kurang optimal

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Pamekasan, 2025

Dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat faktor pendorong dan penghambat pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Mewujudkan transformasi sosial yang produktif melalui sumber daya manusia yang unggul	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Rata Rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah	Adanya anak putus sekolah	Adanya pendataan anak tidak sekolah melalui laman verval ATS	Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan
			Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai	Adanya program pemerintah untuk revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan sedang/berat	Terdapat sekolah yang sulit untuk memenuhi persyaratan administrasi sehingga tidak bisa mendapatkan revitalisasi
			Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	Adanya perekrutan tenaga pendidik ASN	Kebutuhan tenaga pendidik melebihi formasi pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan	Angka partisipasi kasar Angka partisipasi murni Angka partisipasi sekolah	Masyarakat dengan pendapatan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, termasuk biaya pendidikan	Adanya bantuan operasional sekolah sehingga memungkinkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam masalah	Penggunaan biaya operasional sekolah yang kurang sesuai dengan program prioritas



Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
				pendidikan	
			kurang terpenuhinya Infrastruktur pendidikan	Adanya program untuk revitalisasi dan pemenuhan infrastruktur pendidikan	Pendataan sekolah penerima revitalisasi yang kurang optimal
			kurangnya motivasi siswa untuk bersekolah	pemberian perlengkapan siswa untuk memotivasi siswa bersekolah	jumlah perlengkapan yang terbatas dan belum menjangkau semua siswa
			Kurang terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	Adanya program pemerintah untuk percepatan sertifikasi guru melalui Program Profesi Guru (PPG)	Terdapat guru yang memiliki ijazah tidak linier dengan mata pelajaran yang diampu
	Meningkatnya pelestarian budaya daerah	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Pendataan warisan budaya kurang optimal	Adanya warisan budaya yang sudah dilestarikan	kurangnya pengetahuan masyarakat tentang warisan budaya
			Pendataan cagar budaya kurang optimal	Adanya cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan	Belum ada regulasi yang mengatur mengenai penetapan dan pelestarian cagar budaya
			Minimnya tenaga kebudayaan yang memiliki sertifikat	Adanya semangat dari tenaga kebudayaan untuk terus berkarya	Kurangnya fasilitasi terhadap tenaga kebudayaan untuk

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
			keahlian		memperoleh sertifikat keahlian

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

2.2.1.1 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga Terkait dan Provinsi

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi dilaksanakan guna memastikan adanya keselarasan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang relevan dengan urusan pendidikan dan kebudayaan, sehingga pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara terkoordinasi dan terpadu antar-tingkatan pemerintahan.

Hasil telaahan menunjukkan bahwa arah kebijakan serta sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten telah sejalan dengan prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan di tingkat nasional dan provinsi. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Pemetaan Telaah Renstra Kementerian dan Kelembagaan Renstra Provinsi Dalam pelaksanaannya memiliki faktor pendorong dan penghambat secara internal, serta ancaman/tantangan dan peluang secara eksternal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Tabel Bantuan Pemetaan Telaah Renstra K/L Renstra Provinsi

Sasaran Renstra K/L dan Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan (eksisting)	Internal		Eksternal	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ancaman/ Tantangan	Peluang
Sasaran Renstra K/L					
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh	Terdapat sekolah yang rusak dan memerlukan Ruang	Tersedianya dukungan program pemenuhan sarana	Persyaratan yang cukup kompleks sehingga terdapat	Keterbatasan infrastruktur dan akses pendidikan, kurangnya	Adanya program revitalisasi sekolah untuk meningkat



Sasaran Renstra K/L dan Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan (eksistinsi)	Internal		Eksternal	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ancaman/ Tantangan	Peluang
jenjang.	kelas baru namun belum mendapatkan bantuan berupa pembangunan ataupun rehabilitasi	dan prasarana pendidikan dan pemenuhan tenaga pendidik yang kompeten	lembaga yang sulit untuk memenuhi	fasilitas sekolah yang memadai	kan pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.	Rendahnya Nilai literasi dan numerasi sekolah pada rapor pendidikan	Tersedianya dukungan program pengelolaan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kurangnya pendampingan dalam peningkatan literasi dan numerasi di sekolah	Keterbatasan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi	Adanya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan melalui pelatihan dan bimbingan teknis, adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas
Menguatnya karakter peserta didik	Rendahnya Nilai literasi dan numerasi sekolah pada	Tersedianya program pemerintah dalam menekan angka putus	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	Kurangnya integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, Kurangnya	Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah



Sasaran Renstra K/L dan Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan (eksistinsi)	Internal		Eksternal	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ancaman/ Tantangan	Peluang
	rapor pendidikan	sekolah		kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan karakter dapat mempengaruhi pembentukan karakter anak	untuk membentuk peserta didik yang berkarakter baik, Melibatkan orang tua dalam pendidikan karakter untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan karakter
Meningkatnya kemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	Masih rendahnya kualitas SDM kesenian dan lemahnya perlindungan dan pelestarian cagar budaya	Tersedianya dukungan program pembinaan terhadap pelaku budaya dan pelestarian cagar budaya	Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan	Globalisasi dan modernisasi dapat menyebabkan bahasa dan kebudayaan lokal terancam oleh pengaruh budaya asing, Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan bahasa dan kebudayaan dapat menyebabkan penurunan	Upaya kemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan warisan budaya, Pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan dapat meningkat



Sasaran Renstra K/L dan Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan (eksistinsi)	Internal		Eksternal	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ancaman/ Tantangan	Peluang
				penggunaan dan apresiasi terhadap bahasa dan kebudayaan lokal	kan kreativitas dan inovasi dalam bidang seni, sastra, dan budaya
Sasaran Renstra Provinsi					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan	Adanya sosialisasi terkait program yang bersinergi antara provinsi dan kabupaten	Berbedanya sektor pendidikan yang ditangani oleh propinsi dan kabupaten/kota	Kompleksitas sistem pendidikan dapat membuat sulit untuk mengukur kinerja dan akuntabilitas	Melakukan pelaporan kinerja secara berkala dan transparan
Meningkatnya mutu dan profesionalisme kesejahteraan, pemberian penghargaan, dan perlindungan profesi serta	Kurang terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi	Tersedianya dukungan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik	Kurangnya jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang profesional	Kurangnya kesempatan pengembangan karier dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja	Peningkatan mutu dan profesionalisme dapat meningkatkan kesempatan pengembangan



Sasaran Renstra K/L dan Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan (eksistensi)	Internal		Eksternal	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ancaman/ Tantangan	Peluang
pengembangan karier	kualifikasi				ngan karier

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025

2.2.1.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan adalah **“mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan wajib kebutuhan dasar memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan yang ditinjau dari implikasi RT RW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No	Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Penguatan kualitas sumber daya manusia	Kecamatan Palengaan	Memperluas pelayanan pendidikan berbasis pesantren	Belum ada regulasi yang mengatur sinergitas kebijakan pendidikan berbasis pesantren	Belum ada kebijakan maupun strategi yang mengakomodir terkait pengembangan kawasan pendidikan berbasis pesantren	Adanya usulan pengembangan kawasan pendidikan berbasis pesantren di Kecamatan Palengaan
2	Pengembangan sarana	Kecamatan Pakong	Membentuk kawasan pendidikan	Belum ada regulasi yang	Belum ada kebijakan maupun	Adanya usulan pengembangan



No	Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	pendidikan skala lokal		secara bertahap	mengatur kebijakan tentang pengembangan sarana pendidikan skala lokal	strategi yang mengakomodir terkait pengembangan sarana pendidikan skala lokal	garis saranan pendidikan skala lokal

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

2.2.1.3 Telaah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen yang berfungsi memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan lingkungan. Telaahan terhadap dokumen KLHS dilakukan untuk menilai sejauh mana aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup telah diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hasil telaahan, aspek lingkungan hidup telah diakomodasi dalam kebijakan dan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain melalui penguatan pendidikan berbasis lingkungan, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta peningkatan kesadaran ekologi di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten. Selain itu, Tantangan dan Peluang dalam Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 8 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No	Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
1.	Partisipasi masyarakat pada pendidikan non formal masih	Kurangnya minat masyarakat terhadap pendidikan non formal	Kurang optimalnya pelayanan pendidikan khususnya pendidikan non formal	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan non-formal	Mengembangkan program pendidikan non-formal yang relevan dengan kebutuhan

No	Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
	rendah			dapat mempengaruhi partisipasi	masyarakat dapat meningkatkan partisipasi
2.	Mutu akses pendidikan perlu ditingkatkan	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Ketersediaan infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, kekurangan guru yang memiliki kompetensi	adanya perubahan regulasi dalam peningkatan mutu dan akses pendidikan	Adanya program peningkatan akses melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, Adanya peningkatan kualitas guru melalui bimtek dan pelatihan
3.	Belum optimalnya pengembangan kebudayaan daerah	Terhambatnya pengembangan kebudayaan daerah	Kurangnya fasilitasi dalam pengembangan kebudayaan daerah	Belum ada kerjasama yang intensif dengan lembaga ataupun instansi terkait dalam pengembangan budaya daerah	Melakukan sinergi untuk melakukan pengembangan kebudayaan daerah melalui sektor pariwisata
4.	Belum optimalnya keamanan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya	Perlindungan dan pelestarian cagar budaya	Pendataan cagar budaya belum optimal	Belum ada regulasi yang mengatur secara jelas tentang perlindungan dan pelestarian cagar budaya	Mengembangkan pendidikan tentang cagar budaya dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

2.2.1.4 Telaah Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJIPD)

Telaahan terhadap dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJIPD) dilakukan untuk memastikan kesesuaian arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam mengintegrasikan kebijakan pendidikan dengan penguatan

riset, inovasi, dan penerapan teknologi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Secara umum, hasil telaahan menunjukkan adanya keselarasan antara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan RIPJIPD daerah. Keterpaduan ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pendidikan berbasis inovasi dan teknologi, sekaligus mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 2. 9 Telaah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJIPD)

Potensi Unggulan Daerah/ Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Kegiatan	Indikator
Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan dan Kesehatan	Program Pendidikan Keaksaraan dan Literasi		
		Pelaksanaan kelas keaksaraan dasar dan lanjutan	Penurunan angka putus sekolah atau buta aksara di wilayah layanan.
		Penyediaan alat peraga dan bahan ajar keaksaraan	
	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemerataan Akses Pendidikan		
		Bantuan biaya pendidikan (beasiswa miskin) termasuk perlengkapan sekolah	Persentase peningkatan pemanfaatan sarana (ruang kelas, laboratorium, dll).
		Pemberian bantuan berupa subsidi dalam transportasi serta internet	Penurunan angka putus sekolah di kelompok penerima bantuan.
	Program Perluasan Akses dan Pemerataan		



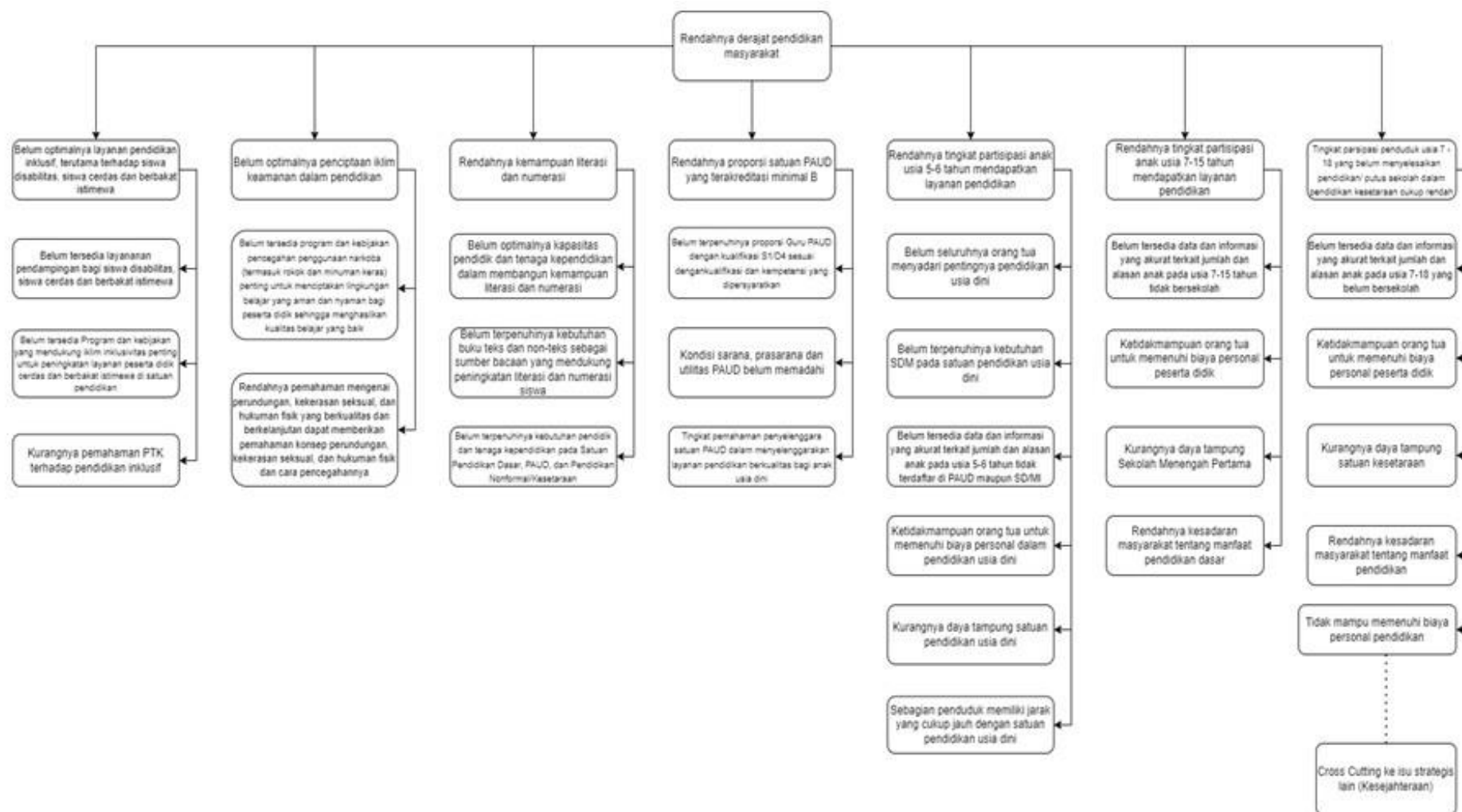
Potensi Unggulan Daerah/ Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator
	Pendidikan Berkualitas		
		Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan	Peningkatan kapasitas tampung peserta didik (jumlah siswa per sekolah).
		Peningkatan Layanan Pendidikan Inklusif dan Khusus	Persentase lulusan yang melanjutkan pendidikan, bekerja, atau berwirausaha.
		Sosialisasi dan Kampanye Wajib Belajar	Tingkat jangkauan kegiatan (jumlah desa, sekolah, atau kelompok masyarakat yang dilibatkan).

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

2.2.2 Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dirumuskan berpedoman pada program pembangunan jangka menengah Kabupaten Pamekasan dan telah dirumuskan mengacu pada prioritas intervensi terhadap isu strategis daerah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Isu strategis dapat bersumber dari tingkat daerah, nasional maupun internasional.



Gambar 2. 2 Pohon Permasalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

Dari gambar 2.2. diatas maka dapat dilihat bahwasanya akar masalah yang menjadi penyebab rendahnya derajat pendidikan masyarakat sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan pendidikan inklusif, terutama terhadap siswa disabilitas, siswa cerdas dan berbakat istimewa
2. Belum optimalnya penciptaan iklim keamanan dalam pendidikan
3. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi
4. Rendahnya proporsi satuan PAUD yang terakreditasi minimal B
5. Rendahnya tingkat partisipasi anak usia 5-6 tahun mendapatkan layanan pendidikan
6. Rendahnya tingkat partisipasi anak usia 7-15 tahun mendapatkan layanan pendidikan
7. Tingkat parsipasi penduduk usia 7 - 18 yang belum menyelesaikan pendidikan/ putus sekolah dalam pendidikan kesetaraan cukup rendah

Diantara penyebab diatas, terdapat penyebab yang beririsan dengan Program tematik nasional Program penanganan kemiskinan ekstrem, yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang menyelesaikan pendidikan (putus sekolah) dan akar masalahnya adalah karena ketidakmampuan dalam menyediakan biaya personil peserta didik.

Terdapat 4 (empat) hal yang menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dan terarah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal, peningkatan mutu dan akses pendidikan yang belum optimal, pengembangan kebudayaan daerah yang belum optimal dan belum optimalnya perlindungan dan pelestarian cagar budaya.



Tabel 2. 10 Isu Strategis

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Permasalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
1	Mengembangkan program pendidikan non-formal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi	Kurang optimalnya pelayanan pendidikan khususnya pendidikan non formal	Partisipasi masyarakat pada pendidikan non formal masih rendah	Integrasi yang mendalam ke dalam kurikulum, pedagogi, dan lingkungan belajar untuk membentuk warga global yang bertanggung jawab	Lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar turut memengaruhi perkembangan perilaku dan hasil belajar siswa	Di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, partisipasi orang tua dalam pendidikan dapat terbatas, dan angka putus sekolah cenderung lebih tinggi.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal
2	Adanya program peningkatan akses melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, Adanya peningkatan kualitas guru melalui bimtek dan pelatihan	Ketersediaan infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, kekurangan guru yang memiliki kompetensi	Mutu akses pendidikan perlu ditingkatkan	Suhu ekstrem dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa, sementara bencana terkait iklim dapat menghambat akses pendidikan secara	Terdapat ketidakmerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia	Infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah yang layak, listrik, dan akses internet, masih sangat terbatas	Peningkatan mutu dan akses pendidikan yang belum optimal



No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Permasalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
				keseluruhan			
3	Melakukan sinergi untuk melakukan pengembangan kebudayaan daerah melalui sektor pariwisata	Kurangnya fasilitasi dalam pengembangan kebudayaan daerah	Belum optimalnya pengembangan kebudayaan daerah	Perpindahan penduduk akibat bencana lingkungan dapat mengakibatkan hilangnya warisan budaya tak berwujud, seperti tradisi lisan, pengetahuan tentang alam, dan praktik-praktik budaya yang terkait dengan lingkungan tertentu.	Komunitas adat di Indonesia telah lama memiliki kearifan lokal untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan	Banyak budaya tradisional memiliki kearifan lokal yang mengajarkan praktik pengelolaan lingkungan yang bijaksana dan berkelanjutan, seperti pelestarian hutan atau ritual pertanian	Belum optimalnya pengembangan kebudayaan daerah
4	Mengembangkan pendidikan tentang cagar budaya dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat	Pendataan cagar budaya belum optimal	Belum optimalnya keamanan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya	Kenaikan permukaan laut, banjir, dan cuaca ekstrem dapat merusak atau menghancurkan situs-situs	Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang diperburuk oleh perubahan iklim dapat menghancurkan	Bencana ekologis seperti badai, banjir, pasang air laut, kekeringan, dan tsunami mengancam	Belum optimalnya keamanan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya



No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Permasalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
				budaya yang rentan, seperti kota-kota pesisir kuno dan artefak bersejarah	situs budaya, mata pencaharian, dan tradisi lokal.	keberadaan situs-situs cagar budaya, terutama yang berada di wilayah pesisir atau dataran rendah	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

Dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan namun masih terdapat permasalahan serta Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang Relevan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih belum optimal. Ada keselarasan isu lingkungan dinamis secara global, nasional dan regional. Sehingga dengan demikian isu strategis dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pamekasan yang berkaitan langsung dengan isu lingkungan dinamis adalah : Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal, Peningkatan mutu dan akses pendidikan yang belum optimal, Belum optimalnya pengembangan kebudayaan daerah, Belum optimalnya keamanan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya.

Adapun penjabaran Isu strategis Adalah sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya program pendidikan nonformal yang menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Secara global, partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk warga dunia yang berdaya saing dan bertanggung jawab. Di tingkat nasional, kesiapan masyarakat dan lingkungan belajar menjadi tantangan dalam meningkatkan hasil belajar. Sementara itu, di tingkat regional, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal menjadi kendala dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia di daerah.
2. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah mutu dan pemerataan akses pendidikan yang masih belum optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas, fasilitas sekolah, jaringan listrik, dan akses internet, masih menghambat pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, jumlah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai standar juga masih perlu ditingkatkan.
3. Upaya pengembangan kebudayaan daerah masih belum maksimal karena kurangnya sinergi antar-sektor, khususnya antara sektor kebudayaan dan pariwisata. Selain itu, keterbatasan fasilitas serta sumber daya pendukung membuat potensi budaya lokal belum

sepenuhnya dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan daerah.

4. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan data, minimnya pendanaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya. Secara global, perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir, badai, dan kenaikan muka air laut menjadi ancaman serius bagi kelestarian situs budaya. Di tingkat nasional, aktivitas pembangunan yang tidak terkendali juga berpotensi mempercepat kerusakan situs bersejarah. Sementara di tingkat regional, tekanan ekologis dan perubahan tata ruang berdampak langsung pada keberadaan peninggalan budaya. Oleh karena itu, peningkatan pendataan, perlindungan, dan upaya pelestarian cagar budaya perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029

Visi pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam rancangan teknokratik RPJMD serta Platform politik kepala daerah terpilih. Selain itu, visi dan misi yang dirumuskan harus memperhatikan visi dan misi Presiden yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029 dan Visi Misi Gubernur yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Dengan demikian, keselarasan visi dan misi pembangunan antara Pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat dapat terjaga.

Visi pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2029 ditetapkan sama dengan visi pembangunan Kepala Daerah terpilih yaitu:

“Bangkit Bersama Untuk Pamekasan Maju”

- MISI 1 : Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter
- MISI 2 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal
- MISI 3 : Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan
- MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengampu Misi yang ke-1 yaitu Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Dalam Misi ke-1 terdapat 3 tujuan, yaitu:

1. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia
3. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengampu Tujuan ke-2 yaitu meningkatnya kualitas pembangunan manusia dengan sasaran strategis peningkatan derajat pendidikan masyarakat.

Sedangkan untuk Bidang Kebudayaan, Mengampu Misi ke-2, yaitu Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

KEPALA
DINASSASARA
N RPJMD

Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat

TUJUAN

Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

INDIKATOR
TUJUAN

Anaka Rata-rata Lama Sekolah dan Anaka Harapan Lama Sekolah

SASARAN

Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan

Meningkatnya pelestarian budaya daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan
keuangan perangkat daerah

INDIKATO

Anaka

Anaka Partisipasi

Anaka Partisipasi

Nilai Pemajuan Kebudayaan

Nilai SAKIP

URUSAN

Urusan Pendidikan

Urusan Kebudayaan

Urusan Penunjang

PROGRAM

Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pendidik

Program
Pengembangan
KebudayaanProgram Pelestarian
dan Pengelolaan
Cagar BudayaProgram
Pengelolaan
PemuseumanProgram Penunjang
Perangkat DaerahINDIKATOR
PROGRAMTingkat Partisipasi Sekolah, Kemampuan Literasi dan
Numerasi, Indek Keamanan, Indek Kebinekaan, Indek
InklusifitasProporsi guru PAUD dengan kualifikasi
Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV),
Persentase guru yang bersertifikat pendidik,
Jumlah tutor pendidikan kesetaraanPresentase Warisan
Budaya yang
dilestarikanPersentase Jumlah
Tenaga Kebudayaan
yang memperoleh
sertifikasi profesi
dibidang kebudayaanPersentase
cagar budaya
dan warisan
budaya tak
benda yang
didaftarkanPersentase
Museum
yang
dilestarikan

BIDANG

BIDANG
PEMBINAAN SDBIDANG
PEMBINAAN SMPBIDANG
PAUDNIBIDANG PENILAIAN
KETENAGAAN KEPENDIDIKAN

PROGRA

Program Pengembangan Kurikulum

Program Pengendalian Perizinan
PendidikanINDIKATOR
PROGRAMPersentase satuan pendidikan yang
melaksanakan kurikulum muatan lokalRasio ketersediaan sekolah/penduduk usia
sekolah pendidikan dasar, Proporsi jumlah
satuan PAUD terakreditasi minimal B

BIDANG

BIDANG PEMBINAAN SD

BIDANG
PEMBINAAN SDBIDANG
PEMBINAAN
SMPBIDANG
PAUDNI

BIDANG KEBUDAYAAN

SEKRETARIAT

Gambar 3. 1 Cascading Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

**Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7					
Urusan Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Peningkatan derajat pendidikan masyarakat	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Rata Rata Lama Sekolah	tahun	7,17	7,18	7,19	7,2	7,21	7,22	7,23
			Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	13,69	13,7	13,71	13,72	13,73	13,74	13,75
			Angka partisipasi kasar SD	nilai	103.54	103.55	103.56	103.57	103.58	103.59	103.6
		Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan	Angka partisipasi kasar SMP	nilai	88.31	88.32	88.33	88.34	88.35	88.36	88.37
			Angka partisipasi murni SD	nilai	98.11	98.12	98.13	98.14	98.15	98.16	98.17
			Angka partisipasi murni SMP	nilai	76.43	76.44	76.45	76.46	76.47	76.48	76.49
			Angka partisipasi sekolah (5-6 tahun)	nilai	80,56	82,61	84,66	86,72	88,77	90,82	92,87
			Angka partisipasi sekolah (7-15 tahun)	nilai	98,89	99,18	99,48	99,78	100	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun)	nilai	19.53	23.63	27.72	31.82	35.92	40.02	44.12



NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7					
			Kesetaraan								
Urusan Kebudayaan											
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan		Meningkatnya pelestarian budaya daerah	Nilai Pemajuan Kebudayaan	persen	23.22	23.72	24.22	24.72	25.22	25.72	26.22
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	81,5	81,6	81.7	81,8	81.9	82.0	82.1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memecahkan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Kurang optimalnya pelayanan pendidikan khususnya pendidikan non formal	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka optimalisasi pelayanan pendidikan nonformal dengan sasaran anak tidak sekolah	Peningkatan pelayanan pendidikan non formal dengan sasaran pengentasan anak tidak sekolah yang sulit mendapatkan akses ke sekolah formal
				Pemenuhan biaya pendidikan dalam rangka mengurangi



PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				beban pengeluaran masyarakat
				Pemutakhiran data terkait siswa putus sekolah
				Melakukan penyisiran terhadap daerah dengan angka putus sekolah tertinggi
				Peningkatan aksesibilitas melalui penyediaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan pendidikan nonformal yang mudah dijangkau, terutama di daerah terpencil
				Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas untuk memberikan dukungan sarana, prasarana, serta peluang lanjut studi atau kerja bagi lulusan pendidikan formal maupun pendidikan non formal
Ketersediaan infrastruktur pendidikan yang kurang memadai,	Peningkatan mutu dan akses pendidikan		Pendataan kebutuhan infrastruktur pendidikan,	Penguatan kualitas pendidikan dengan



PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
kekurangan guru yang memiliki kompetensi	yang belum optimal		Pemenuhan standard pelayanan minimal pendidikan	mengoptimalkan sarana prasarana pendidikan dan sistem pendidikan (pembangunan karakter, pemenuhan gizi siswa, revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi sekolah penguatan wajib belajar 13 tahun dan penerapan sekolah model transformatif
				Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui kurikulum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
				Memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.
				Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan agar kualitas layanan antarwilayah lebih seimbang.
				Memastikan anak dari keluarga miskin, daerah terpencil, serta kelompok rentan tetap mendapat layanan pendidikan
				Meningkatkan angka partisipasi



PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				sekolah di semua jenjang, terutama bagi anak usia wajib belajar. Mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran serta kemitraan dengan komunitas dan dunia usaha akan memperluas akses sekaligus relevansi pendidikan
Kurangnya fasilitasi dalam pengembangan kebudayaan daerah	Belum optimalnya pengembangan kebudayaan daerah	Meningkatnya pelestarian budaya daerah	Pengembangan kawasan seni dan budaya serta publikasi event seni dan budaya dengan melibatkan kreator muda melalui media sosial	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebudayaan melalui perkumpulan para pelaku seni budaya serta kajian pengembangan kebudayaan daerah
Pendataan cagar budaya belum optimal	Belum optimalnya keamanan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya		Melakukan pencatatan dan registrasi cagar budaya sehingga dapat dijadikan sebagai cagar budaya yang perlu dilindungi serta dilestarikan	Optimalisasi pelestarian cagar budaya melalui registrasi, serta perumusan langkah strategis dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

Dari tabel diatas, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dirumuskan dalam RPJMD sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 3. 3 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SASARAN RPJMD :			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka optimalisasi pelayanan pendidikan nonformal dengan sasaran anak tidak sekolah	Peningkatan pelayanan pendidikan non formal dengan sasaran pengentasan anak tidak sekolah yang sulit mendapatkan akses ke sekolah formal
			Pemenuhan biaya pendidikan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat
			Pemutakhiran data terkait siswa putus sekolah
			Melakukan penyisiran terhadap daerah dengan angka putus sekolah tertinggi
			Peningkatan aksesibilitas melalui penyediaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan pendidikan nonformal yang mudah dijangkau, terutama di daerah terpencil
			Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas untuk memberikan dukungan sarana, prasarana, serta peluang lanjut studi atau kerja bagi lulusan pendidikan formal maupun pendidikan non formal
		Pendataan	Penguatan kualitas



SASARAN RPJMD :			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
		kebutuhan infrastruktur pendidikan, Pemenuhan standard pelayanan minimal pendidikan	pendidikan dengan mengoptimalkan sarana prasarana pendidikan dan sistem pendidikan (pembangunan karakter, pemenuhan gizi siswa, revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi sekolah penguatan wajib belajar 13 tahun dan penerapan sekolah model transformatif
			Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui kurikulum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
			Memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.
			Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan agar kualitas layanan antarwilayah lebih seimbang.
			Memastikan anak dari keluarga miskin, daerah terpencil, serta kelompok rentan tetap mendapat layanan pendidikan
			Meningkatkan angka partisipasi sekolah di semua jenjang, terutama bagi anak usia wajib belajar.
			Mengintegrasikan teknologi digital



SASARAN RPJMD :			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
			dalam pembelajaran serta kemitraan dengan komunitas dan dunia usaha akan memperluas akses sekaligus relevansi pendidikan
	Meningkatnya pelestarian budaya daerah	Pengembangan kawasan seni dan budaya serta publikasi event seni dan budaya dengan melibatkan kreator muda melalui media sosial	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebudayaan melalui perkumpulan para pelaku seni budaya serta kajian pengembangan kebudayaan daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Melakukan pencatatan dan registrasi cagar budaya sehingga dapat dijadikan sebagai cagar budaya yang perlu dilindungi serta dilestarikan	Optimalisasi pelestarian cagar budaya melalui registrasi, serta perumusan langkah strategis dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan telah selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pamekasan.



Tabel 3. 4 Penahapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Memperkuat landasan dalam peningkatan mutu dan layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Optimalisasi dalam peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pelaku seni	Meningkatkan kolaborasi berbasis riset dan teknologi dalam optimalisasi layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat kemitraan dengan Lembaga yang memiliki perhatian dalam peningkatan layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Memantapkan stabilitas mutu dan layanan Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

Dari tabel diatas terdapat tahapan yang dilaksanakan dalam jangka 5 tahun sampai periode akhir Renstra. Arah kebijakan ini selaras dengan janji politik Kepala Daerah terpilih yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelaksanaan pengembangan mutu dan layanan pendidikan serta kebudayaan direncanakan melalui lima tahapan strategis yang berkesinambungan dalam periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Setiap tahapan dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan serta pelestarian kebudayaan yang berdaya saing. Adapun rincian Penahapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Tahap I (Tahun 2026) difokuskan pada kegiatan memperkuat landasan dalam peningkatan mutu dan layanan pendidikan dan kebudayaan. Pada tahap ini dilakukan penguatan sistem, regulasi, serta koordinasi kelembagaan guna menciptakan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan program pada tahapan berikutnya.
2. Tahap II (Tahun 2027) diarahkan pada optimalisasi peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelaku seni. Kegiatan pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat yang dinamis.

3. Tahap III (Tahun 2028) berorientasi pada peningkatan kolaborasi berbasis riset dan teknologi dalam rangka optimalisasi mutu layanan pendidikan dan kebudayaan. Tahapan ini menitikberatkan pada pengembangan inovasi dan kemitraan akademik maupun praktis guna memperkuat efektivitas serta relevansi kebijakan dan program.
4. Tahap IV (Tahun 2029) diarahkan untuk memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga yang memiliki peran strategis dalam peningkatan layanan pendidikan dan kebudayaan. Melalui sinergi dan kerja sama lintas sektor, diharapkan terwujud peningkatan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan program.
5. Tahap V (Tahun 2030), fokus diarahkan pada pemantapan dan stabilitas mutu serta layanan pendidikan dan kebudayaan. Tahapan ini bertujuan memastikan keberlanjutan program, stabilitas sistem pelayanan, serta peningkatan daya saing pendidikan dan kebudayaan di tingkat daerah maupun nasional.

Tabel 3. 5 Linearitas Operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Integrasi dunia pendidikan, riset dan teknologi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pelayanan pendidikan non formal dengan sasaran pengentasan anak tidak sekolah yang sulit mendapatkan akses ke sekolah formal	✓	✓	✓	✓	✓
2			Pemenuhan biaya pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
			dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat					
3			Pemutakhiran data terkait siswa putus sekolah	✓				
4			Melakukan penyisiran terhadap daerah dengan angka putus sekolah tertinggi	✓				
5			Peningkatan aksesibilitas melalui penyediaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan pendidikan nonformal yang mudah dijangkau, terutama di daerah terpencil			✓		
6			Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas					✓



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
			untuk memberikan dukungan sarana, prasarana, serta peluang lanjut studi atau kerja bagi lulusan pendidikan formal maupun pendidikan non formal					
7			Penguatan kualitas pendidikan dengan mengoptimalkan sarana prasarana pendidikan dan sistem pendidikan (pembangunan karakter, pemenuhan gizi siswa, revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi sekolah penguatan wajib belajar 13 tahun dan penerapan sekolah model transformatif		✓	✓	✓	✓



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
8			Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui kurikulum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	✓	✓	✓	✓	✓
9			Memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.		✓			
10			Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan agar kualitas layanan antarwilayah lebih seimbang.		✓			
11			Memastikan anak dari keluarga miskin, daerah terpencil, serta kelompok rentan tetap mendapat layanan pendidikan			✓		
12			Meningkatkan angka partisipasi sekolah di semua jenjang,				✓	



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
			terutama bagi anak usia wajib belajar.					
13			Mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran serta kemitraan dengan komunitas dan dunia usaha akan memperluas akses sekaligus relevansi pendidikan					✓
14	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Mendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya lokal serta aktivitas seni yang dimiliki oleh berbagai kelompok etnis dan suku di kabupaten Pamekasan	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebudayaan melalui perkumpulan para pelaku seni budaya serta kajian pengembangan kebudayaan daerah	✓	✓	✓	✓	✓
15	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya		Optimalisasi pelestarian cagar budaya melalui registrasi, serta perumusan	✓	✓	✓	✓	✓



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
			langkah strategis dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya					

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

Secara lebih rinci, arah kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dari tahun 2026 hingga tahun 2030 lebih rincinya sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Matriks Arah Kebijakan

NO	ARAH KEBIJAKAN	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan pelayanan pendidikan non formal dengan sasaran pengentasan anak tidak sekolah yang sulit mendapatkan akses ke sekolah formal	✓	✓	✓	✓	✓
2	Pemenuhan biaya pendidikan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
3	Pemutakhiran data terkait siswa putus sekolah	✓				
4	Melakukan penyisiran terhadap daerah dengan angka putus sekolah tertinggi	✓				
5	Peningkatan aksesibilitas melalui penyediaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan pendidikan nonformal yang mudah dijangkau, terutama di daerah terpencil			✓		
6	Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas untuk memberikan dukungan sarana, prasarana, serta peluang lanjut studi atau kerja bagi lulusan pendidikan formal maupun pendidikan non formal					✓
7	Penguatan kualitas pendidikan dengan mengoptimalkan sarana prasarana pendidikan dan sistem pendidikan (pembangunan karakter, pemenuhan gizi siswa, revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi sekolah penguatan wajib belajar 13 tahun dan penerapan sekolah model transformatif		✓	✓	✓	✓
8	Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui kurikulum	✓	✓	✓	✓	✓



NO	ARAH KEBIJAKAN	2026	2027	2028	2029	2030
	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)					
9	Memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.		✓			
10	Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan agar kualitas layanan antarwilayah lebih seimbang.		✓			
11	Memastikan anak dari keluarga miskin, daerah terpencil, serta kelompok rentan tetap mendapat layanan pendidikan			✓		
12	Meningkatkan angka partisipasi sekolah di semua jenjang, terutama bagi anak usia wajib belajar.				✓	
13	Mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran serta kemitraan dengan komunitas dan dunia usaha akan memperluas akses sekaligus relevansi pendidikan					✓
14	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebudayaan melalui perkumpulan para pelaku seni budaya serta kajian pengembangan kebudayaan daerah	✓	✓	✓	✓	✓
15	Optimalisasi pelestarian cagar budaya melalui registrasi, serta perumusan langkah strategis dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

Adapun integrasi antar rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dengan janji politik bupati ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 7 Integrasi Janji Politik dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program Politik	Program Nomenklatur	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang/Unit Kerja
1	Santri Aktif Berprestasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
2	Rangkul Anak Tidak Sekolah (ATS)	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Bidang Pembinaan PAUD dan Nonformal



No	Program Politik	Program Nomenklatur	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang/Unit Kerja
3	Event Kreator Muda	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan
4	Pengembangan Kawasan Seni dan Budaya	Program Pengelolaan Pemuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	Bidang Kebudayaan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa janji politik kepala daerah terpilih telah terintegrasi dalam renstra serta selaras dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai tugas dan fungsinya telah membantu dalam pelaksanaan janji politik kepala daerah terpilih selama periode 2025 – 2029.



BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Program pembangunan jangka menengah daerah telah dirumuskan berdasarkan pada program prioritas intrvensi terhadap isu dstrategis daerah. Untuk menjaga konsistensi dan afirmasi pemerintah terhadap isu pembangunan, maka program pembangunan ditetapkan dengan target dan alokasi anggaran. Alokasi anggaran ditetapkan dengan mempertmbangkan kerangka pendanaan Kabupaten Pmekasan untuk tahun 2026-2030.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengampu urusan pelayanan dasar yaitu Pendidikan dan urusan kebudayaan, berkewajiban untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada program pembangunan jangka menengah daerah.

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Tabel di bawah ini memuat rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan.



**Tabel 4. 1 Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat				Angka Rata Rata Lama Sekolah		
					Angka Harapan Lama Sekolah		
		Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan			Angka partisipasi kasar SD		
					Angka partisipasi kasar SMP		
					Angka partisipasi murni SD		
					Angka partisipasi murni SMP		
					Angka partisipasi sekolah (5-6 tahun)		
					Angka partisipasi sekolah (7-15 tahun)		
					Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan		
			Meningkatnya mutu dan akses		Tingkat Partisipasi Warga Negara (Anak) Usia 5-6		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			pelayan pendidikan usia dini		Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD		
				Terlaksananya pelayanan pendidikan usia dini	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang memadai		
						Program Pengelolaan Pendidikan	
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
						Pengadaan Mebel PAUD	
						Pengadaan Perlengkapan PAUD	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Dana BOP PAUD	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
						Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
			Meningkatkan mutu dan akses pelayanan pendidikan sekolah		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			dasar				
					Kemampuan literasi (SD)		
					Kemampuan numerasi (SD)		
					Iklim Inklusifitas		
					Iklim Keamanan		
					Iklim Kebinekaan		
				Terlaksananya pelayanan pendidikan sekolah dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang memadai		
						Program Pengelolaan Pendidikan	
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
						Pembangunan Ruang Perpustakaan	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
						Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
						Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pendidikan	
						Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			Meningkatkan mutu dan akses pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama		Tingkat Partisipasi Warga Negara (Anak) Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama		
					Kemampuan literasi (SMP)		
					Kemampuan numerasi (SMP)		
					Iklim Inklusifitas		
					Iklim Keamanan		
					Iklim Kebinekaan		
				Terlaksananya pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memadai		
						Program Pengelolaan Pendidikan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
						Pembangunan Laboratorium	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
						Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Layanan di Bidang Pendidikan	
						Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	
						Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			Meningkatkan mutu dan akses pelayanan pendidikan kesetaraan		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
				Terlaksananya pelayanan pendidikan kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan yang memadai		
						Program Pengelolaan Pendidikan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	
						Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas		Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diplo ma empat (D-IV)		
			tenaga pendidik dan tenaga kependidikan		Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik		
			jenjang pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan		Jumlah tutor pendidikan kesetaraan		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemertaaan kualitas dan kuantitas pendidik dan Tenaga kependidikan	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan		
						Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatkan kualitas implementasi kurikulum sekolah		Persentase satuan pendidikan dasar, usia dini, dan non formal yang melaksanakan kurikulum muatan lokal		
				Terlaksananya Implementasi kurikulum sekolah yang berkualitas	Jumlah sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal		
						Program Pengembangan Kurikulum	
						Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
						Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			Meningkatkan lembaga yang memenuhi izin operasi		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			ional		Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B		
				Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang diberikan rekomendasi perizinan		
						Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
						Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Terlaksananya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diberikan rekomendasi perizinan		
						Program Pengendalian	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Perizinan Pendidikan	
						Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya		Meningkatkan pelestarian budaya daerah		Nilai Pemajuan Kebudayaan			
			Meningkatkan		Presentase Warisan Budaya yang dilestarikan		
			pengembangan kebudayaan daerah		Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan		
				Terlaksananya kebudayaan daerah yang berkembang	Persentase kebudayaan daerah yang dikembangkan		
						Program Pengembangan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						gan Kebudayaa n	
						Pengelolaan Kebudayaa n yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	
						Pelindunga n, Pengemban gan, Pemanfaata n Objek Pemajuan Kebudayaa n	
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaa n	
				Terlaks ananya pelesta rian kesenia n tradisio nal	Persentase kesenian tradisional yang dilestarika n		
						Program Pengemban gan Kebudayaa n	
						Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	
						Pelindunga n, Pengemban gan, Pemanfaata n Objek Pemajuan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Tradisi Budaya	
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
				Terlaksananya pembinaan lembaga adat	Persentase lembaga adat yang dibangun		
						Program Pengembangan Kebudayaan	
						Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten /Kota	
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
			Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola		Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan		
				Terlaksananya Cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
						Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota	
						Pelindungan Cagar Budaya	
			Meningkatkan museum yang dilestarikan dan dikelola		Persentase Museum yang dilestarikan		
				Terlaksananya pelestarian dan pengelolaan Museum	Jumlah museum yang dilestarikan dan dikelola		
						Program Pengelolaan Pemuseuman	
						Pengelolaan Museum Kabupaten /Kota	
						Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	
						Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseum	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						an	
						Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
						Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP		
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman		
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibukukan sesuai pedoman		
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi		
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya organisasi yang difasilitasi	Persentase Organisasi yang difasilitasi		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Penataan Organisasi	
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan kerangka pendanaan untuk memastikan program tersebut terlaksana secara efektif dan efisien. Kerangka pendanaan adalah analisis pengeluaran keuangan daerah untuk menertibkan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional.

Sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBD Kabupaten Pamekasan, APBD Provinsi Jawa Timur, APBN serta dana-dana dari pihak lain seperti swasta, CSR, Masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Tabel berikut merupakan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diselaraskan dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Rata Rata Lama Sekolah	7,17	7,1 9	638,878,7 12,615	7,2	651,232, 758,001	7,2 1	665,552, 433,960	7,2 2	672,930, 367,209	7,2 3	675,926, 804,789	
	Angka Harapan Lama Sekolah	13,6 9	13, 71		13, 72		13, 73		13, 74		13, 75		
Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan	Angka partisipasi kasar SD	103. 54	103 .56	637,175,9 12,615	103 .57	638,811, 908,225	103 .58	661,197, 277,729	103 .59	668,555, 090,076	103 .6	671,531, 205,755	
	Angka partisipasi kasar SMP	88.3 1	88. 33		88. 34		88. 35		88. 36		88. 37		
	Angka partisipasi murni SD	98.1 1	98. 13		98. 14		98. 15		98. 16		98. 17		
	Angka partisipasi murni SMP	76.4 3	76. 45		76. 46		76. 47		76. 48		76. 49		
	Angka partisipasi sekolah (5-6 tahun)	80,5 6	84, 66		86, 72		88, 77		90, 82		92, 87		
	Angka partisipasi sekolah (7-15 tahun)	98,8 9	99, 48		99, 78		100		100		100		
	Angka Partisipasi	19.5 3	27. 72		31. 82		35. 92		40. 02		44. 12		



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan												
Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Nilai Pemajuan Kebudayaan	23.2 2	24. 22	1,682,800 ,000	24. 72	11,693,5 48,776	25. 22	3,620,58 2,221	25. 72	3,633,35 9,133	26. 22	3,646,26 3,034	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81.5	81. 7	487,101,9 35,899	81. 8	491,524, 095,400	81. 9	496,368, 060,643	82	501,334, 875,910	82. 1	506,351, 319,329	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				487,101,9 35,899		491,524, 095,400		496,368, 060,643		501,334, 875,910		506,351, 319,329	
	Presentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan	100	10 0	35,000,00 0	10 0	82,533,9 18	10 0	86,533,9 18	10 0	90,533,9 18	10 0	94,533,9 18	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	tepat waktu												
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi hasil Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		
	Persentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		
Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja yang disusun	100	100	35,000,00 0	100	82,533,9 18	100	86,533,9 18	100	90,533,9 18	100	94,533,9 18	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	tepat waktu												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	35,000,000	2	59,590,000	2	60,590,000	2	61,590,000	2	62,590,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	108		-	108	5,050,000	108	6,050,000	108	7,050,000	108	8,050,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	23		-	23	5,050,000	23	6,050,000	23	7,050,000	23	8,050,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3		-	3	12,843,918	3	13,843,918	3	14,843,918	3	15,843,918	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perangkat Daerah												
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang ditetapkan	100	100	484,710,189,711	100	489,036,132,465	100	493,926,493,790	100	498,865,758,728	100	503,854,416,315	
	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Dearah yang dilaporkan tepat waktu	100	100				100				100		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman	100	100	484,710,189,711	100	489,036,132,465	100	493,926,493,790	100	498,865,758,728	100	503,854,416,315	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	5576	5576	484,710,189,711	5632	489,036,132,465	5688	493,926,493,790	5745	498,865,758,728	5802	503,854,416,315	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tunjangan ASN												
Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja ASN	Persentase ASN yang menyusun Perjanjian Kinerja dan SKP sesuai pedoman dan tepat waktu	100	10 0	345,000,0 00	10 0	373,565, 367	10 0	313,000, 649	10 0	316,130, 655	10 0	319,291, 961	
	Persentase ASN yang melaporkan Capaian SKP nya sesuai pedoman dan tepat waktu	100	10 0				10 0				10 0		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	100	100	325,000,0 00	100	353,365, 367	100	292,598, 649	100	295,524, 635	100	298,479, 881	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	5	100,000,0 00	15	101,000,0 00	15	86,708,50 0	15	87,575,58 5	15	88,451,34 1	
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan	12	12	75.000.00	12	75.750.00	12	53.034.08	12	53.564.42	12	54.100.06	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kantor	Logistik Kantor yang Disediakan			0		0		1		2		6	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	12	5,000,000	12	5,050,000	12	5,100,500	12	5,151,505	12	5,203,020	
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	80,000,000	12	80,800,000	12	56,082,547	12	56,643,372	12	57,209,806	
Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	2822	3495	50,000,000	2850	59,475,567	2850	60,070,323	2850	60,671,026	2850	61,277,736	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	18	13	15,000,000	18	31,289,800	18	31,602,698	18	31,918,725	18	32,237,912	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Elektronik pada SKPD												
Penataan Organisasi	Persentase Organisasi yang difasilitasi	100	100	20,000,00 0	100	20,200,0 00	100	20,402,0 00	100	20,606,0 20	100	20,812,0 80	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1	20,000,00 0	1	20,200,00 0	1	20,402,00 0	1	20,606,02 0	1	20,812,08 0	
Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana penunjang yang terpenuhi	100	10 0	2,011,746 ,188	10 0	2,031,86 3,650	10 0	2,042,03 2,286	10 0	2,062,45 2,609	10 0	2,083,07 7,135	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibukukan sesuai pedoman	100	100	30,000,00 0	100	30,300,0 00	100	20,453,0 00	100	20,657,5 30	100	20,864,1 05	
Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaa	13	13	30,000,00 0	13	30,300,00 0	13	20,453,00 0	13	20,657,53 0	13	20,864,10 5	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SKPD	n Barang Milik Daerah pada SKPD												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100	100	500,000,0 00	100	505,000, 000	100	510,050, 000	100	515,150, 500	100	520,302, 005	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	500,000,0 00	1	505,000,0 00	1	510,050,0 00	1	515,150,5 00	1	520,302,0 05	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah n yang disediakan	100	100	1,283,746 ,188	100	1,296,58 3,650	100	1,309,54 9,486	100	1,322,64 4,981		1,335,87 1,431	
Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan	12	12	240,000,0 00	13	242,400,0 00	13	244,824,0 00	13	247,272,2 40	13	249,744,9 62	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1,043,746, 188	12	1,054,183 ,650	12	1,064,725 ,486	12	1,075,372 ,741	12	1,086,126 ,469	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	100	198,000,0 00	100	199,980, 000	100	201,979, 800	100	203,999, 598	100	206,039, 594	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	3	3	80,000,00 0	3	80,800,00 0	3	81,608,00 0	3	82,424,08 0	3	83,248,32 1	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	25	20,000,00 0	12	20,200,00 0	12	20,402,00 0	12	20,606,02 0	12	20,812,08 0	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2	2	98,000,00 0	2	98,980,00 0	2	99,969,80 0	2	100,969,4 98	2	101,979,1 93	
PROGRAM PENGELOLAA N PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara (Anak) Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipas i Dalam PAUD	98.0 8	100	150,053,9 76,716	100	147,238, 009,220	100	164,778, 915,445	100	167,169, 409,509	100	165,128, 573,722	
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang	97.9 3	100		100		100		100				



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Berpartisipas i Dalam Pendidikan Dasar												
	Kemampuan literasi (SD)	52,8 4	57, 84		60, 34		62, 84		65, 34		67, 84		
	Kemampuan numerasi (SD)	49,2 8	55, 08		57, 98		60, 88		63, 78		66, 68		
	Iklim Inklusifitas	56,2 2	61, 22		63, 72		66, 22		68, 72		71, 22		
	Iklim Keamanan	69,5 3	71, 33		72, 23		73, 13		74, 03		74, 93		
	Iklim Kebinekaan	69,0 8	70, 08		72, 08		73, 08		74, 08		75, 08		
	Tingkat Partisipasi Warga Negara (Anak) Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipas i Dalam Pendidikan Menengah Pertama	98.9 6	100		100		100		100		100		
	Kemampuan literasi (SMP)	57,7 6	59, 96		61, 06		62, 16		63, 26		64, 36		
	Kemampuan	55,8	58,		60,		61,		63,		64,		



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	numerasi (SMP)	8	88		38		88		38		88		
	Iklim Inklusifitas	53,6 2	58, 42		60, 82		63, 22		65, 52		68, 02		
	Iklim Keamanan	64,3 8	67, 38		68, 88		70, 38		71, 88		73, 38		
	Iklim Kebinekaan	67,2 4	69, 24		70, 24		71, 24		72, 24		73, 24		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaik an pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipas i dalam pendidikan kesetaraan	27.0 3	29. 03		30. 03		31. 03		32. 03		33. 03		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	100	100	93,714,37 0,716	100	68,173,6 19,017	100	84,891,6 54,218	100	86,449,9 24,370	100	83,567,4 41,567	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1						-					
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7											
Pembangunan Ruang Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4											
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	105	13	1,375,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1											



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sekolah/TU	yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat												
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4											
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5			2	100,000,0 00	2	100,000,0 00	2	100,000,0 00	2	100,000,0 00	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo mba Akademik dan Non Akademik	1500 0	100 00	220,000,0 00	106 05	101,000,0 00	107 11	102,010,0 00	108 18	103,030,1 00	109 26	104,060,4 01	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan	9651	800 0	10,000,00 0	800 0	10,000,00 0	800 0	10,000,00 0	800 0	10,000,00 0	800 0	10,000,00 0	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sekolah Dasar	Pendidikan Sekolah Dasar												
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650	700	80,000,000	101	105,141,000	102	106,192,410	103	107,254,334	104	108,326,877	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1911	2000	75,000,000	1449	75,000,000	1450	75,000,000	1478	100,000,000	1493	125,000,000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	476	477	63,072,18 0,000	477	63,702,90 1,800	477	64,339,93 0,800	477	64,983,33 0,100	477	65,633,16 3,400	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0	550	75,000,00 0	556	75,750,00 0	561	76,507,50 0	567	77,272,57 5	572	78,045,30 1	
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	8											
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	0	50	25,000,00 0	51	12,625,00 0	51	12,751,25 0	52	12,878,76 3	52	13,007,55 0	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pendidikan	Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan												
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	3	25,000,000	3	25,250,000	3	25,502,500	3	25,757,525	3	26,015,100	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	50	25,000,000	25	25,250,000	26	25,502,500	26	25,757,525	26	26,015,100	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	2	25,000,000	1	25,250,000	1	25,502,500	1	25,757,525	1	26,015,100	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0	5	25,000,000	5	12,625,000	5	12,751,250	5	12,878,763	5	13,007,550	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0	1	25,000,000	1	50,500,000	1	51,005,000	1	51,515,050	1	52,030,201	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5	1	25,000,000	1010	101,000,000	1020	102,010,000	1030	103,030,100	1041	104,060,401	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	49	130	26,707,190,716.00	2	400,000,000	45	9,205,938,401	49	9,987,201,401	31	6,320,191,372	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Jumlah Sarana, Prasarana	9			2	200,000,000	13	2,402,299,065	13	2,426,322,056	13	2,450,585,276	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prasarana dan Utilitas Sekolah	dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi												
Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggar akan Proses Belajar dan Ujian	477	477	125,000,0 00	482	50,500,00 0	487	51,005,00 0	491	51,515,05 0	496	52,030,20 1	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	59	12	1,800,000, 000	12	2,548,326 ,217	68	7,612,721 ,042	69	7,688,848 ,253	70	7,765,736 ,735	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0			81	50,500,00 0	82	51,005,00 0	82	51,515,05 0	83	52,030,20 0	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8			2	202,000,0 00	2	204,020,0 00	2	206,060,2 00	2	208,120,8 02	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	100	100	28,061,850,000	1	35,411,687,523	100	35,760,054,398	100	36,111,904,942	100	36,467,273,992	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1			1	79,767,780	1	80,565,458	1	81,371,113	1	82,184,824	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1			1	39,532,107	1	39,927,428	1	40,326,702	1	40,729,969	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0		0	-	0	-	0	-	
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6			5	428,468,765	5	432,753,453	5	437,080,988	5	441,451,799	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	18	3	300,000,000.00	12	2,412,489,510	12	2,436,614,405	12	2,460,980,549	12	2,485,590,354	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	23	2	300,000,000.00	21	1,715,394,756	21	1,732,548,704	22	1,749,874,191	22	1,767,372,933	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0		0	-	0	-	0	-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0		0	-	0	-	0	-	
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah				0		0	-	0	-	0	-	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Direhabilitasi Sedang/Berat												
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3			3	365,564,4 50	3	369,220,0 94	3	372,912,2 95	3	376,641,4 18	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1			1	203,963,4 40	1	206,003,0 74	1	208,063,1 04	1	210,143,7 35	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000			246 7	343,400	249 2	346,834	251 7	350,302	254 2	353,805	
Pemberian bantuan khusus siswa miskin	Jumlah siswa miskin yang mendapatkan beasiswa		1,0 00	500,000,0 00	1,0 00	500,000,0 00	1,0 00	500,000,0 00	1,0 00	500,000,0 00	1,0 00	500,000,0 00	
Pemberian uang pembinaan	Jumlah santri berprestasi yang				15	75,000,00 0	15	75,000,00 0	15	75,000,00 0	15	75,000,00 0	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
bagi santri berprestasi	mendapatkan uang pembinaan												
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo mba Akademik dan Non Akademik	2715	217 5	100,000,0 00	274 2	101,000,0 00	277 0	102,010,0 00	279 7	103,030,1 00	282 5	104,060,4 01	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golo ngan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1983	198 3	100,000,0 00	200 3	101,000,0 00	202 3	102,010,0 00	204 3	103,030,1 00	206 4	104,060,4 01	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	181	180	30,000,00 0	180	30,300,00 0	180	30,603,00 0	180	30,909,03 0	180	31,218,12 0	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	181	182	25,585,61 0,000	182	25,841,46 6,100	182	26,099,88 0,761	182	26,360,87 9,568	182	26,624,48 8,364	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0		0	-	0	-	0	-	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	0	195 3	45,000,00 0	51	45,450,00 0	51	45,904,50 0	52	46,363,54 5	52	46,827,18 0	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(TIK) untuk Pendidikan												
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	1575	45,000,000	51	45,450,000	51	45,904,500	52	46,363,545	52	46,827,180	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	5	45,000,000	1	45,450,000	1	45,904,500	1	46,363,545	1	46,827,181	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0			0		0	-	0	-	0	-	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	2123 7	203 04	65,000,00 0	214 49	65,650,00 0	216 64	66,306,50 0	218 81	66,969,56 5	220 99	67,639,26 1	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	16	2	400,000,0 00	11	2,763,694 ,815	11	2,791,331 ,763	11	2,819,245 ,081	11	2,847,437 ,532	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0			0		0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10	5	546,240,0 00	5	551,702,4 00	5	557,219,4 24	5	562,791,6 19	5	568,419,5 35	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	91.9 8	100	24,325,12 6,000	100	36,580,6 17,800	100	36,946,4 20,100	100	37,315,8 83,600	100	37,689,0 40,600	
Pembangunan Sarana,	Jumlah Gedung/Rua	65	17	2,800,000,	56. 56	11,062,74	57	11,173,37	58	11,285,10	58	11,397,95	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prasarana dan Utilitas PAUD	ng Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			000		3,868		0,000		3,700		4,700	
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia						0	-	0	-	0	-	
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2			5.0 5	24,244,94 9	5	24,486,00 0	5	24,730,80 0	5	24,978,00 0	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik						0	-	0	-	0	-	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0			50. 5	50,500,00 0	51	51,005,00 0	52	51,515,00 0	52	52,030,00 0	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	185	50	50,000,000	101	45,899,450	102	46,357,000	103	46,820,500	104	47,288,700	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	250	100	100,000,000	101	79,170,567	102	79,962,273	103	80,761,300	104	81,568,900	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	989	907	16,055,580,000	918.09	16,216,135,800	927	16,378,297,000	937	16,542,079,900	946	16,707,500,600	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan	450	39	25,000,000	1.01	4,040,000	1	4,080,400	1	4,121,000	1	4,162,000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dana BOP PAUD	Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD												
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		30	30,000,000	30.3	30,300,000	31	30,603,000	31	30,909,000	31	31,218,000	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0			1.01	46,639,275	1	47,105,000	1	47,576,000	1	48,051,700	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan	0	5	15,000,000	13.13	14,944,970	13	15,093,000	13	15,243,900	14	15,396,000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tenaga Kependidikan	Tenaga Pendidik yang terfasilitasi												
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	57			45. 45	3,528,221 ,158	46	3,563,503 ,000	46	3,599,138 ,000	47	3,635,129 ,000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	6	105	5,249,546, 000	41. 41	5,445,331 ,513	42	5,499,788 ,427	42	5,554,786 ,800	43	5,610,334 ,400	
Penyelenggara an Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	275			282 80	32,446,25 0	285 63	32,770,00 0	288 48	33,097,70 0	291 37	33,428,60 0	
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Persentase Pendidikan Kesetaraan/ Nonformal yang dikelola	100	100	3,952,630 ,000	100	7,072,08 4,880	100	7,180,78 6,729	100	7,291,69 6,597	100	7,404,81 7,563	
Penyediaan Biaya Personil	Jumlah Peserta Didik	200			202	459,045,0	204	463,635,4	206	468,271,8	208	472,954,5	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Non Formal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					00		50		05		24	
Rangkul Anak Tidak Sekolah (ATS)	Jumlah anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kejar paket A/B/C				1378	2,618,200,000	1,419	2,696,100,000	1,461	2,775,900,000	1,504	2,857,600,000	
	Jumlah anak putus sekolah yang belum mengikuti pendidikan kejar paket A/B/C		723	1,373,700,000	723	1,373,700,000	723	1,373,700,000	723	1,373,700,000	723	1,373,700,000	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan				0		0	-	0	-	0	-	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	30	30,000,000	45	30,300,000	46	30,603,000	46	30,909,030	47	31,218,121	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50	21	50,000,000	23	50,500,000	23	51,005,000	24	51,515,050	24	52,030,201	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola	23	21	2,458,930,000	21	2,483,519,300	21	2,508,354,493	22	2,533,438,038	22	2,558,772,418	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dana BOP												
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	50	21	15,000,000	1	1,718,010	1	1,735,190	1	1,752,542	1	1,770,067	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		25	25,000,000	25	25,250,000	26	25,502,500	26	25,757,525	26	26,015,100	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	0			1	7,580,555	1	7,656,361	1	7,732,924	1	7,810,253	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Bidang Pendidikan												
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0	-	0	-	0	-	0	-	
Penyelenggara an Proses Belajar Nonformal/Kes etaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	45			3030	22,272,015	3060	22,494,735	3091	22,719,683	3122	22,946,879	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia							-		-		-	
PROGRAM PENGEMBAN GAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar, usia dini, dan non formal yang	100		-		20,200,000		20,402,000		20,606,020		20,812,080	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	melaksanak an kurikulum muatan lokal												
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase SD yang menetapkan Kurikulum Muatan Lokal			0		20,200,0 00		20,402,0 00		20,606,0 20		20,812,0 80	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensiny a	0			40	10,100,00 0	40	10,201,00 0	40	10,303,01 0	40	10,406,04 0	
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaia n Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaia n Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0			1	10,100,00 0	1	10,201,00 0	1	10,303,01 0	1	10,406,04 0	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIK AN	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	81,47	82,29	20,000,000	82,7	727,301,000	83,11	734,574,010	83,53	741,918,000	83,94	749,336,000	
	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	55.07	56.18		56.74		57.31		57.88		58.46		
	Jumlah tutor pendidikan kesetaraan	109	111		112		113		115		116		
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidika n			20,000,000		727,301,000		734,574,010		741,918,000		749,336,000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	242	1	10,000,000	202	714,676,000	204	721,822,760	206	729,040,000	208	736,330,000	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	0	1	10,000,000	101	12,625,000	102	12,751,250	103	12,878,000	104	13,006,000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Non Formal/Keset araan												
PROGRAM PENGENDALI AN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah/pen duduk usia sekolah pendidikan dasar	70	80	20,000,00 0	85	29,603,6 05	90	29,899,6 41	95	30,198,6 37	100	30,500,6 24	
	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatka n minimal akreditasi B		82. 29		82. 70		83. 11		83. 53		83. 94		
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarak an oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang diberikan rekomendasi perizinan		100	20,000,00 0		20,200,0 00		20,402,0 00		20,606,0 20		20,812,0 80	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian	0	5	20,000,00 0	20	20,200,00 0	20	20,402,00 0	20	20,606,02 0	20	20,812,08 0	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat												
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	81.47	82.29		82.7	9,403,605	83.11	9,497,641	83.53	9,592,617	83.94	9,688,544	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan	200			30	9,403,605	30	9,497,641	30	9,592,617	30	9,688,544	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	an oleh Masyarakat												
PROGRAM PENGEMBAN GAN KEBUDAYAAN	Presentase Warisan Budaya yang dilestarikan	100	100	542,800,000	100	531,032,716	100	446,441,000	100	447,476,500	100	448,521,575	
	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	100	100		100		100		100		100		
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota yang dikelola	100	100	542,800,000	100	456,032,716	100	370,691,000	100	370,969,000	100	371,249,000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembanga n, Pemanfaatan	5	12	200,000,000	1	101,000,000	1	15,537,000	1	15,692,000	1	15,848,000	
Event Kreator Muda	Jumlah event kesenian dan budaya yang dipublikasika n oleh kreator muda melalui media sosial		12	342,800,000	12	342,800,000	12	342,800,000	12	342,800,000	12	342,800,000	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50			40	12,232,716	40	12,354,000	40	12,477,000	40	12,601,000	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	100	100		100	50,000,000	100	50,500,000	100	51,005,000	100	51,515,050.00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
dalam Daerah Kabupaten/K ota													
Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembanga n dan Pemanfaatan				1	25,000,00 0	1	25,250,00 0	1	25,502,50 0	1	25,757,52 5.00	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				50	25,000,00 0	50	25,250,00 0	50	25,502,50 0	50	25,757,52 5.00	
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/K ota	Persentase lembaga adat yang dibina	100	100		100	25,000,0 00	100	25,250,0 00	100	25,502,5 00	100	25,757,52 5.00	
Pembinaan Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya				50	25,000,00	50	25,250,00	50	25,502,50	50	25,757,52	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina					0		0		0		5.00	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAA N CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	100	100	75,000,00 0	100	145,235, 475	100	146,687, 830	100	148,154, 708	100	149,636, 255	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/K ota	Persentase cagar budaya yang dikelola	100	100	75,000,00 0	100	145,235, 475	100	146,687, 830	100	148,154, 708	100	149,636, 255	
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	15	15	75,000,00 0	15	145,235,4 75	15	146,687,8 30	15	148,154,7 08	15	149,636,2 55	
PROGRAM PENGELOLAA N PEMUSEUMA N	Persentase Museum yang dilestarikan	75	77	1,065,000 ,000	78	11,017,2 80,585	79	3,027,45 3,391	80	3,037,72 7,925	81	3,048,10 5,204	
Pengelolaan Museum Kabupaten/K ota	Persentase Mueum yang dikelola	100	100	1,065,000 ,000	100	11,017,2 80,585	100	3,027,45 3,391	100	3,037,72 7,925	100	3,048,10 5,204	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelindungan, Pengembangan , dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembanga n, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	410	5	240,000,0 00	5	330,076,5 85	5	333,377,3 51	5	336,711,1 24	5	340,078,2 36	
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuma n yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya		20	80,000,00 0	20	80,800,00 0	20	81,608,00 0	20	82,424,08 0	20	83,248,32 1	
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5000	500 0	520,000,0 00	500 0	566,004,0 00	500 0	571,664,0 40	500 0	577,380,6 80	500 0	583,154,4 87	
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		1	40,000,00 0	1	40,400,00 0	1	40,804,00 0	1	41,212,04 0	1	41,624,16 0	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keter angan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya												
Pengembangan Kawasan Seni dan Budaya	Jumlah Kawasan Seni dan Budaya yang dikembangk an		1	185,000,000	1	10,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

Diantara program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera pada Tabel 4.2 diatas, terdapat program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai janji politik dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Pamekasan. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Santri Aktif Berprestasi Program ini memastikan menggali dan mengembangkan potensi santri yang berprestasi	Pemberian uang pembinaan bagi santri berprestasi	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan akan dimulai tahun 2026
		Pemberian bantuan khusus siswa miskin		
2	Rangkul Anak Tidak Sekolah (ATS)	Fasilitasi pendidikan kejar paket A/B/C bagi anak putus sekolah	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Sub kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Pelaksanaan akan dimulai tahun 2026
3	Pengembangan Kawasan Seni dan Budaya	Pengembangan kawasan seni dan budaya (taman budaya)	Kegiatan : Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan akan dimulai tahun 2026



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
4	Event Kreator Muda	Publikasi event seni dan budaya dengan melibatkan kreator muda melalui media sosial	Kegiatan: Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelaksanaan akan dimulai tahun 2026

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, terdapat indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.



Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Angka Rata Rata Lama Sekolah	tahun	7,18	7,19	7,2	7,21	7,22	7,23	
2	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	13,7	13,71	13,72	13,73	13,74	13,75	
3	Angka partisipasi kasar SD	nilai	103.55	103.56	103.57	103.58	103.59	103.6	
4	Angka partisipasi kasar SMP	nilai	88.32	88.33	88.34	88.35	88.36	88.37	
5	Angka partisipasi murni SD	nilai	98.12	98.13	98.14	98.15	98.16	98.17	
6	Angka partisipasi murni SMP	nilai	76.44	76.45	76.46	76.47	76.48	76.49	
7	Angka partisipasi sekolah (5-6 tahun)	nilai	82,61	84,66	86,72	88,77	90,82	92,87	
8	Angka partisipasi sekolah (7-15 tahun)	nilai	99,18	99,48	99,78	100	100	100	
9	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan	nilai	23.63	27.72	31.82	35.92	40.02	44.12	
10	Nilai Pemajuan Kebudayaan	nilai	23.72	24.22	24.72	25.22	25.72	26.22	
11	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81.6	81.7	81.8	81.9	82	82.1	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025

4.2.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain Indikator Kinerja Utama, tcapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kunci ini merupakan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan secara lebih terperinci untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	persen	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	persen	28.03	29.03	30.03	31.03	32.03	33.03	
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	55,34	57,84	60,34	62,84	65,34	67,84	
5	Rata-rata	nilai	52,18	55,08	57,98	60,88	63,78	66,68	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Kete- rang- an
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional								
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	58,86	59,96	61,06	62,16	63,26	64,36	
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	57,38	58,88	60,38	61,88	63,38	64,88	
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	persen	81.88	82.29	82.7	83.11	83.53	83.94	
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	persen	81.88	82,29	82,7	83,11	83,53	83,94	
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	nilai	70,43	71,33	72,23	73,13	74,03	74,93	
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	nilai	65,88	67,38	68,88	70,38	71,88	73,38	
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	nilai	70.08	71,08	72,08	73,08	74,08	75,08	
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	nilai	68,24	69,24	70,24	71,24	72,24	73,24	
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	nilai	58,72	61,22	63,72	66,22	68,72	71,22	
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	nilai	56,02	58,42	60,82	63,22	65,52	68,02	
16	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	persen	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Jumlah Cagar budaya dan	persen	100	100	100	100	100	100	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	warisan budaya tak benda yang didaftarkan								
18	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, 2025



BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, perangkat daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan.

1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut merupakan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra:



- a. Kepala dinas wajib menyebarluaskan Rencana Strategis Perangkat daerah kepada masyarakat;
- b. Penyusunan RKPD 2025-2029 berpedoman pada Rencana Strategis 2025-2029;
- c. Seluruh bidang teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar mendukung pencapaian target sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029;
- d. Seluruh bidang teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar melaksanakan program yang tercantum pada Rencana Strategis dengan sebaik-baiknya;
- e. Penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan melalui konsultasi dengan Bapperida Pamekasan serta melaksanakan penyalarsan tujuan, sasaran, program prioritas dalam RPJMD sehingga pencapaian tujuan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

2. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin keselarasan antar dokumen perencanaan serta konsistensi implementasi pembangunan dengan dokumen perencanaan, maka ditentukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang ditujukan untuk mengawal implementasi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. Berikut merupakan ketentuan pengendalian dan evaluasi:

- a. Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung program prioritas serta indikasi kebutuhan pendanaan;
- c. Pengendalian pelaksanaan dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pemantauan dilaksanakan dengan memastikan program prioritas pembangunan daerah telah dijadikan sebagai acuan dan dalam pelaksanaannya telah



- d. Pemantauan dilaksanakan dengan memastikan program prioritas pembangunan daerah telah dijadikan sebagai acuan dan dalam pelaksanaannya telah diselaraskan dengan program kegiatan disertai kebutuhan pendanaannya;
- e. Hasil pemantauan digunakan untuk melakukan evaluasi dan memastikan bahwa program dan indikasi rencana program prioritas serta pendanaannya telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pamekasan, 20 November 2025
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN



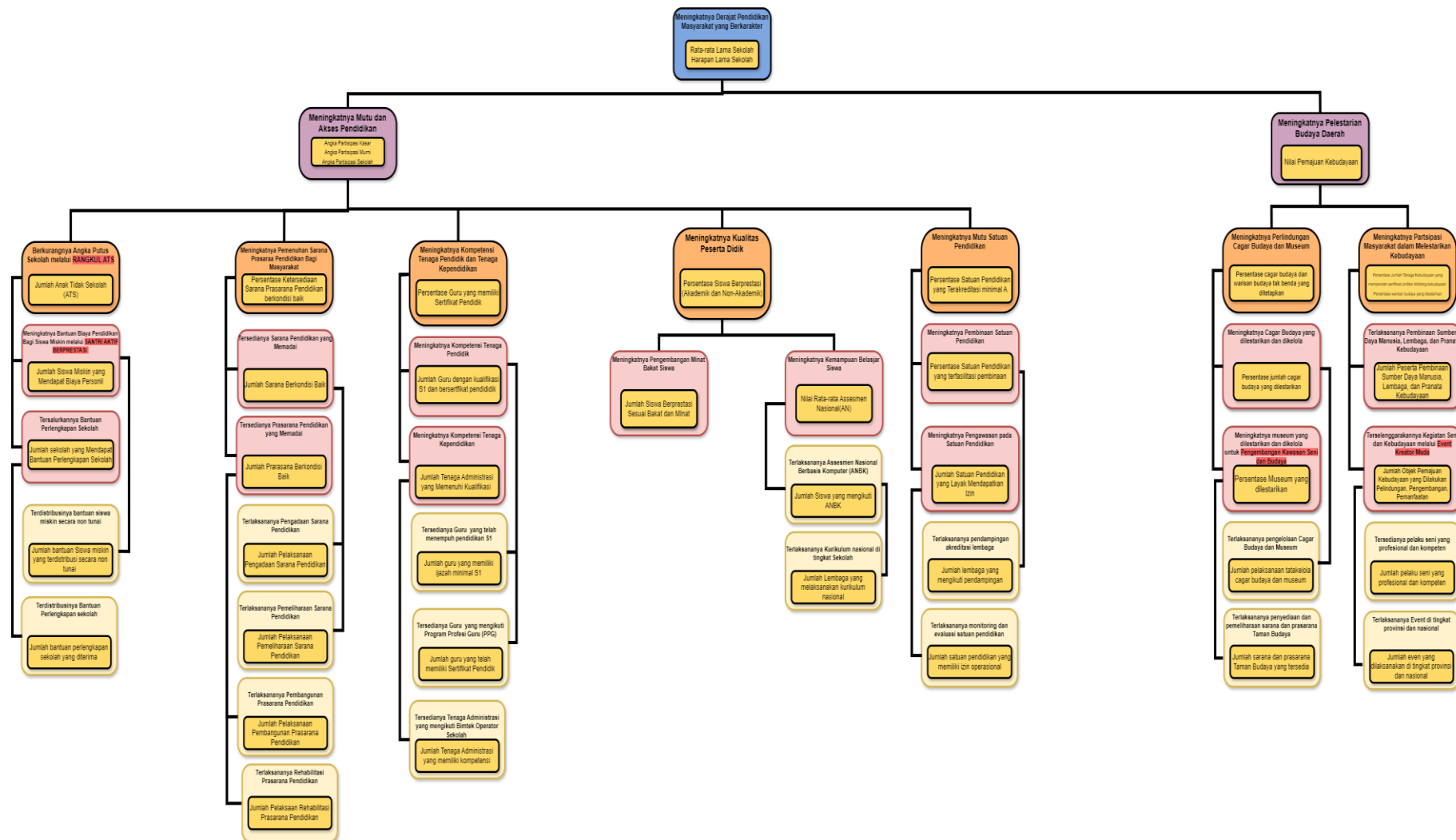
AKHMAD BASRI YULIANTO, S.H., M.Si

NIP. 19680731 199803 1 002

Pembina Utama Muda

LAMPIRAN

1. POHON KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kinerja Utama		Definisi Operasional/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Pengumpul Data
	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama			
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani penduduk usia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal. $RLS = \frac{\sum (\text{Penduduk}_{25}^{+} \times \text{Tahun sekolah ditamatkan})}{\text{Jumlah penduduk}_{25}^{+}}$	BPS (Susenas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2		Angka Harapan Lama Sekolah	Jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun dengan asumsi pola partisipasi sekolah saat ini tetap. $HLS = \sum (APS_i \div 100), i = 7 \rightarrow \text{usia maksimum}$	BPS (Susenas),	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan	Angka partisipasi kasar	Perbandingan jumlah peserta didik pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah resmi pada jenjang tersebut. $APK = \frac{\text{Jumlah siswa jenjang}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah resmi}} \times 100\%$	BPS (Susenas), Kemendikbudristek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4		Angka partisipasi murni	Perbandingan jumlah peserta didik dengan usia sesuai jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah	BPS (Susenas), Kemendikbudristek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	Kinerja Utama		Definisi Operasional/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Pengumpul Data
	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama			
			resmi pada jenjang tersebut. $\text{APM} = (\text{Jumlah siswa usia resmi} \div \text{Jumlah penduduk usia sekolah resmi}) \times 100\%$		
5		Angka partisipasi sekolah (5-6 tahun)	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan apa pun. $\text{APS}(5-6) = (\text{Penduduk sekolah usia 5-6} \div \text{Jumlah penduduk usia 5-6}) \times 100\%$	BPS (Susenas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6		Angka partisipasi sekolah (7-15 tahun)	Persentase penduduk usia 7-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan apa pun. $\text{APS}(7-15) = (\text{Penduduk sekolah usia 7-15} \div \text{Jumlah penduduk usia 7-15}) \times 100\%$	BPS (Susenas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7		Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang sedang bersekolah pada pendidikan formal maupun kesetaraan. $\text{APS}(7-18) = (\text{Penduduk sekolah usia 7-18 (formal + kesetaraan)} \div \text{Jumlah penduduk usia 7-18}) \times 100\%$	BPS (Susenas), Kemendikbudristek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Meningkatnya pelestarian budaya daerah	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Nilai komposit capaian daerah dalam mengembangkan, melestarikan, memanfaatkan, dan mendokumentasikan objek pemajuan kebudayaan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	Kinerja Utama		Definisi Operasional/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Pengumpul Data
	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama			
			Indeks = Σ (Nilai capaian tiap objek) ÷ Jumlah objek		
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dihitung melalui 4 kriteria utama meliputi: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Masing-masing Kriteria memiliki bobot tersendiri meliputi: 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Penilaian akan menghasilkan nilai antara 0-100 dengan interpretasi positif	Kementerian PANRB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	Kinerja Utama		Definisi Operasional/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Pengumpul Data																								
	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama																											
			Nilai sakip diklasifikasikan ke dalam 7 predikat sebagai berikut : <table><tr><td>Predikat</td><td>Nilai Absolut</td><td>Interpretasi</td></tr><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup (memadai)</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup (memadai)	C	>30-50	Kurang	D	>0-30	Sangat Kurang		
Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi																											
AA	>90-100	Sangat Memuaskan																											
A	>80-90	Memuaskan																											
BB	>70-80	Sangat Baik																											
B	>60-70	Baik																											
CC	>50-60	Cukup (memadai)																											
C	>30-50	Kurang																											
D	>0-30	Sangat Kurang																											

3. IKK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional/ Formulasi Hitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Pengumpul Data
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima)}} \times 100\%$	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional/ Formulasi Hitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Pengumpul Data
		belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan		
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah}} \times 100\%$	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi	Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten.	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan



No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional/ Formulasi Hitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Pengumpul Data
	B			Kebudayaan
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 di kota/kabupaten.	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	Kemendik bud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional/ Formulasi Hitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Pengumpul Data
16	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi penetapan WBTb}}{\text{Jumlah rekomendasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi WBTb}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kebudayaan yang disertifikasi dan lulus sertifikasi}}{\text{Jumlah Tenaga Kebudayaan}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan